



**RISALAH RAPAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (RAKER)
Dengan	: Menteri Tata Ruang/Kepala BPN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 22 Januari 2014
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam susunan "Kabinet Kerja" 2014-2019
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Anggota Komisi II DPR RI 34 dari 50 Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
7. DIAH PITALOKA, S.sos
8. Ir. TAGORE ABUBAKAR
9. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM

F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

10. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
11. Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR
12. TABRANI MAAMUN
13. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

14. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
15. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si
16. H. SUBARNA, SE.,M.Si
17. SUASANA DACHI, SH

AI DEMOKRAT (F-PD)

AN MUSTOFA, M.Si.

ANDI UTOMO

20. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

21. YANDRI SUSANTO

22. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.

23. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn

24. AMRAN, S.E.

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

25. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si

26. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

F-PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

27. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.

F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

28. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY

29. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

30. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH

31. Drs. TAMANURI, MM

32. H. M. LUTHFI A. MUTTY

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

33. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH

34. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

B. Pemerintah

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
(Drs. FERRY MURSYIDAN BALDAN)

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat saudara Menteri Agraria dan tata ruang, beserta jajarannya.

Yang terhormat saudara Pimpinan dan anggota Komisi II.

Terlebih dulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat Komisi II Menteri Agraria dan tata ruang dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang pengawasan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

l 251, rapat ini dihadiri anggota berjumlah 30 orang, fraksinya saudara Menteri ini, dengan demikian rapat ini dengan i buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-beasrnya atas kehadiran saudara Menteri dan jajarannya.

Dari rapat kemarin dengan Menteri Aparatur penggemarnya banyak, dan hari ini dengan KPU juga tadi banyak, kami ucapkan, erima kasih atas kehadirannya. Oleh karena itu kita mau tetapkan dulu acara kita termasuk mekanismenya.

Pertama kami memperkenalkan Pimpinan dan anggota Komisi II, lalu perkenalan Kementerian Agraria, baru kita minta beberapa penjealsan sekaligus dalam acara kita tentang rencana strategis Kementerian agraria dan Tata Ruang dalam susunan kabiner kerja.

Oleh karenanya apakah 3 pokok acara ini bisa kita setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Mekanisme pembicaraan kita akan kita akhiri nanti paling lama saya kira sebelum magrib, jadi bagaimana kita mengaturnya, yang ingin menunaikannya sebab kalau kita skors nanti akan berkepanjangan. Oleh karenanya beberapa hal akan kami sampaikan untuk perkenalan, kami sendiri adalah Rambe Kamarujaman dari Fraksi Golkar selaku Pimpinan Komisi II, jadi kalau saya sebut dari partai Golkar itu asal muasal dengan Saudara Menteri pada waktu itu.

Di sebelah kanan saya adalah sauara Rizal, dari Fraksi partai Gerindra. Di sebelah kanan adalah Saudara Yang terhormat Mustafa Kamal dari PKS, di sebelah kiri kami yang terhormat Wahidin Halim dari Fraksi Demokrat, dari sebelah kiri adalah saudara yang terhormat Lukman Edy dari F-PKB. Selanjutnya karena ini rapat pertama, sayap kanan dulu saudara Menteri baru nanti masuk ke sayap kiri, kami persilakan.

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si):

**Pimpinan yang saya hormati,
Menteri Agraria, Tata ruang, Badan Pertanahan Nasional yang saya hormati,**

Perkenalkan nama saya Bambang Riyanto dari Fraksi Gerindra, dapil Jawa Tengah V. Terima kasih.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. JOSEPH, MM):

Terima kasih pimpinan.

Nama saya Willy M. Joseph, dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Kalimantan Tengah, terima kasih.

F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):

Terima kasih pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran.

esi Selatan, saya dari Fraksi partai Nasdem.

, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Saya Azikin Solthan dari Fraksi Gerindra, dapil I Sulawesi Selatan, Makassar dan sekitarnya.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PD (Ir. FANDI UTOMO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Saya Fandi Utomo dari Fraksi partai Demokrat, Dapil Jawa Timur I, Surabaya, Sidoarjo, terima kasih.

F-PG (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Terima kasih.

Saya Dadang Muchtar (tidak menggunakan mic).

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil):

(tidak menggunakan mic).

F-PAN (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

**Pimpinan rapat yang kami hormati,
Pak Menteri beserta jajaran,**

Saya nama Asyarif Abdullah A-29, dari dapil pemilihan Kalimantan Barat, ini juga titip salam masyarakat perbatasan kepada Pak Menteri karena Menteri sekarang punya hak pilih di daerah, ini mungkin suatu hal yang harus saya sampaikan, terima kasih.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Komisi II,
Pak Menteri dan jajarannya,**

Banten II, Kota Serang Cilegon, No Anggota A-494 dari Fraksi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PG (TABRANI MAAMUN):

Terima kasih Pimpinan.
Nama saya Tabrani dari dapil Riau I, dari partai Golkar.

F-PG (Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Hj. Enny Anggraeny Anwar, dapil Sulawesi Barat, partai Golkar.

F-GERINDRA (SUASANA DACHI, SH):

Terima kasih.
Dapil Sumut II, Dachi, terima kasih.

F-PAN (H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Nama saya Sukiman, dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, dari Fraksi PAN, dan ini yang periode yang kedua, terima kasih.

F-PPP (KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY):

Terima kasih.
Saya Asep Ahmad Maoshul Affandy anggota 520, fraksi partai Persatuan Pembanguna, dapil Jawa Barat X, Kuningan Cismis, Banjar dan Pangandaran.

F-PAN (AMRAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan jajarannya.

Perkenalkan saya Amran, No anggota 503, dari fraksi PAN, dapil Sulawesi Selatan III, saa dengan Pak Lutfhi, Pak Lutfhi ini bupati saya, sekian.

Wabilahitaufik walhidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

S.l.p.):

Nama saya masih Mangindaan, bertemu lagi, dari no anggota 448, fraksi Demokrat daerah pemilihan Sulawesi Utara, terima kasih.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Pak Menteri yang terhormat,

Perkenalkan saya Rufinus Hutaauruk dari dapil Sumut II, no anggota 546, sekian sementara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Barangkali saya perkenalkan Tagore Abubakar, dapil II Aceh, dari PDI Perjuangan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PG (Drs. A. H. MUJIB ROHMAT):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Teman-teman Komisi II,
Pak Menteri,**

Pak Ferry yang juga lulusan Komisi II, dan jajarannya yang saya hormati, nama saya Mujib Rohmat, saya dari fraksi Golkar, dari dapil I Jawa Tengah meliputi Semarang, Ungaran, Salatiga, dan Kabupaten Kendal, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PD (Drs. TAMANURI, MM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Lampung, fraksi Nasdem.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.sos):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Nama saya Diah Pitaloka dari dapil Jabar III dari fraksi PDI Perjuangan, terima kasih.

F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam sejahtera.

**Menteri Agraria yang saya hormati,
Pimpinan serta anggota Komisi II yang saya hormati,**

Perkenalkan nama saya Ammu Amalia, saya dari Fraksi PAN, dapil Jawa Tengah VIII, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si) :

Terima kasih.

Dapil Jawa Tengah IX, kabupaten Brebes, kabupaten Tegal diwakili Agung Widyantoro, A-279 dari partai Golkar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI):

Terima kasih.

Nama Muhamad Arwani Thomafi dari fraksi PPP, dapil Jawa Tengah III, kabupaten Rembang, Blora, Pati dan Grobogan.

Tidak ada lagi kan?

Baik, saudara Menteri, di Komisi II ini adalah... saya kira tidak ada juga...(suara tidak jelas), setelah itu beberapa politisi, ada yang mantan Gubernur, Mantan Menteri, jadi di Komisi II ini termasuk Saudara Novanto di Komisi II, dan mantan Bupati, dan walikota. Oleh karena itu nanti Pak Menteri menjelaskan rombongannya biar ringkas karena ini rapat pertama yang ingin kita bincangkan terkait nomenklatur kementerian agraria dan tata ruang, sebagaimana ruang lingkup tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar DPR Republik Indonesia selaku legislatif untuk mengawasi kebijakan tersebut.

Yang kedua soal peralihan dari bentuk lembaga non kementerian, seperti BPN menjadi kementerian dengan nomenklatur yakni agraria dan tata ruang terutama jika dilihat dari susunan struktural secara internal. Yang ketiga Komisi II DPR RI ingin mengetahui rencana strategis dari

tahun ke depan dalam menjalankan fungsi pokoknya, yang an dan tata ruang dalam menyelesaikan konflik dan sengketa annya dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kasus tanah itu, oleh karenanya nanti pak Menteri memperkenalkan jajarannya sekaligus baru kita buka pendalaman. Oleh karenanya kita sampaikan pendalamannya nanti adalah masing-masing fraksi kita berikan agak leluasa 10 menit, mau 3 orang bicara tapi kita berikan jatah 10 menit tidak boleh lebih lama, jadi kita atur sedemikian rupa sebelum masuk ruangan ini kita akan atur ini Komisi II untuk tetap bersama dengan jajaran Kementerian Agraria, soalnya sudah hapal juga, dari mulai jamannya Pak Menteri tidak pernah ganti, tapi sekali kita kirsu di ruangan ini padahal sangat penting untuk kita bicarakan, oleh karena itu ruangan ini sudah AC dan seluruh ruangan...(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT :

Kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan pada siang hari ini, silakan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN (Drs. FERRY MURSIDAN BALDAN):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatu.

Ketua Komisi II, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Komisill serta sekretariat Komisi II, dan Pak Mangindaan.

Mengawali pertemuan kita pada hari ini, saya kira emosi saya kemudian hanyut kepada suasana komisi, karena terlalu panjang, saya tidak pernah tidak di Komisi II ini, saya bilang tolong ingatkan saya jangan nanti saya berlaku seperti Komisill, karena sejak saya mengawali karir sebagai anggota Dewan tidak pernah keluar dari Komisi II, dan mic ini adalah mic abadi ada jimatnya.

Sebelumnya kami ingin perkenalkan, kita belum melakukan perubahan struktur, kita menunggu perpres tentang struktur yang berubah termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di sebelah kanan saya, Pak Sestama meski dalam konsep Perpres nanti jabatan Sestama berubah menjadi Sekjen, kemudian ada Pak Irawan Sumarto Deputi survey pengukuran dan pemetaan, kemudian ada Pak Gede yang kemarin baru berulang tahun dia, kemudian ada Pak Doddy deputi bidang pengaturan, dan pengendalian pertanahan, kemudian Prof. Budi Mulyanto Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, kemudian Dr. Bambang TS, deputi bidang penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Kemudian ada Pak Dr. Yuswanda ini inspektur utama, ini bukan orang Depdagri, tapi kembarannya, kelakuannya berbeda, saya pastikan itu, yang lain jajaran Eselon II, tata ruang, saya kira ini Ibu Dr. Rina dari Sekretaris Direktur Tata Ruang, kemudian ada Pak Budi Situmorang dari Direktur Penataan kemudian Pak Firman Hutapea Direktur program dan kemitraan, kemudian ada Direktur Pembinaan penataan Ruang Dedi Permadi, yang lain teman-teman dari BPN yang sudah disebut bagian dari Kementerian.

Memang Pak Ketua yang sedang kita lakukan penyesuaian semua, saya mengawali penjelasan bahwa dari sisi anggaran kami termasuk Kementerian yang tidak mengajukan APBN ke II, kita memakai apa yang sudah ditetapkan dalam APBN 2015 di awal dan saya kira itu berasal dari anggaran untuk BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang yang semula berada di PU, dan jadi itulah sumber anggaran.

Sebagai sebuah Kementerian baru kami ingin memberikan pengantar itu perpaduan masalah pertanahan yang tidak asing lagi bagi Ibu dan Bapak sekalian, Pimpinan dan anggota Komisi II, dan

lama ini menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum,
mitra kerja Komisi V.

menyampaikan surat undangan bahwa ada rencana strategis

Kementerian tata ruang dan BPN bahwa didalam proses pembangunan kerja Kementerian dan Lembaga ada hierarki dan perencanaan, sebagai pedoman jangka panjang, dikenal adanya pembangunan jangka panjang atau RPJP dengan periode waktu 20 tahun, dari 2005-2025, RPJP nasional merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan perumusan visi dan misi dan arah pembangunan nasional.

Memenuhi peraturan teknis dalam peraturan Pemerintah nonmor 5 tahun 2014 bahwa setiap Kementerian lembaga menyusun restranya masing-masing sehingga kami tidak menyusun renstranya masing-masing, sehingga kami tidak menyusun visi dan misi masing-masing Kementerian.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah yang harus menjalankan akedahnya, menjalankan visi misi Pemerintah dalam rangka 9 agenda Pemerintah periode 2014-2019, kemudian dari 9 itu kami wujudkan dalam tujuan dalam tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, menjalankan visi dan misi masing-masing Kementerian.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Sebagai bagian dari kelembagaan pemerintah yang harus menjalankan agenda nasional, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN menjalankan visi misi Pemerintah dalam rangka 9 agenda prioritas Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dan dari 9 itu kemudian kami wujudkan dalam tujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang pertama yakni adalah bahwa pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam perolehan ruang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini satu hal yang perlu kami fokus tajamkan, yang kedua adalah mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan untuk memberikan kepastian hak atas tanah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua.

Yang ketiga adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat marginal, baik secara sosial, ekonomi dan geografis. Kemudian yang keempat adalah mempercepat konektifitas pembangunan nasional sebagai sebuah bangsa, sebagaimana rencana tata ruang nasional menjadi payung dari semua pelaksanaan pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.

Yang kelima adalah perwujudan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan pembangkit listrik, rencana tata ruang wilayah, sesuai dengan RT RW. Yang keenam adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Agraria, dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dan keenam kita ingin memakai istilah restorasi, tapi saya bilang tidak boleh karena menterinya berasal dari yang ada restorasinya, jadi istilah reformasi saja. karenanya ada 7 tugas fungsi kelembagaan yang kami susun yakni :

1. Pelaksanaan tata ruang
2. Pelaksanaan infrastruktur keagrariaan
3. Pengelolaan keagrariaan
4. Penataan dan reformasi agraria
5. Pengadaan tanah
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah

an tata ruang.

Ketua yang saya hormati,

Dalam perjalanan rumusan akan kami elaborasi dalam rapat kerja Kementerian, kita akan melakukan rapat kerja pada hari senin, selasa, rabu, dan untuk merumuskan target-target setiap tahun berkaitan dengan beberapa hal.

Dalam konteks rincian maka satu adalah tata ruang, revisi tata ruang wilayah nasional dan kita akan lakukan pengembangan rapat kawasan perbatasan kebijakan Presiden menjadikan etalase, (suara tidak jelas), kawasan rawan bencana, saya kira kita memiliki sejumlah tanah tapi memang itu tanah yang cukup jauh dari lokasi yang berpotensi sebagai bencana, dan kita akan sisir itu sebagai pemindahan, dan mereka hanya boleh bercocok tanam.

Dua adalah program pengembangan infrastruktur, ini sudah dibantu dan kita sudah punya komitmen untuk melakukan pemetaan dalam rangka satu peta, kehutanan, kelautan, pertanian dan kementerian agraria sudah sepakat menggunakan itu peta sehingga tu beberapa hal yang bisa kita selesaikan diantaranya perencanaan tata ruang wilayah kalimantan tengah yang sudah bisa on progress dan bisa selesai Januari ini.

Kemudian yang ketiga, program pengelolaan agraria, yang keempat program pentaan reformasi agraria, kelima program pengadaan tanah, keenam program pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan tanah, tujuh program penanganan masalah agraria dan tata ruang.

Saya kira itu yang disampaikan, bahwa hal yang berkaitan dengan sengketa tidak pernah kami lepaskan dari berbagai item dan ini menjadi target penyelesaian.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Selain dari itu Kementerian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional juga memiliki point yang berkaitan dengan beberapa hal, menyiapkan Perpres penyiapan tanah, penyusunan, reformasi agraria, revisi penataan ruang, dan diantaranya Jabodetabek dan kawasan lainnya, perlindungan PPNS.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk penjabaran cara melihatnya, ada penyediaan lahan sebagai prioritas pembangunan yakni dalam rangka mencapai ketahanan pangan kami menyiapkan lahan pertanian dan lahan ...

Lahan untuk pertanian ini kita dasarkan pada kebutuhan pertanian, tentang berapa jumlah lahan yang harus diadakan dicetak baru sebagai upaya mencapai tingkat produktifitas, produksi pangan, dan mencapai ketahanan pangan dan tergantung pada Kementerian Pertanian, untuk bendungan beberapa titik ini juga kita lakukan proses berdasarkan luasan lahan(suara tidak jelas).

Kemudian laut sebagai sebuah program Pemerintah periode 2014-2019 kita menambah berapa pelabuhan di luar pelabuhan yang sudah ada sebagai satu titik dari sabang sampai merauke seagai akses untuk menghubungkan akses sentra industri sebagai sebuah jawaban dari biota laut, dan juga pembangkit listrik, pembangunan infrastruktur, dan juga kereta api dan bandara, batas teritori NKRI khusus untuk ini selesai pada 2015, akrena ini satu hal yang ketika kita sudah sertifikatkan maka kemudian kita daftarkan di Mahkamah Internasional dan pengelolaannya kita sebar, kita menyampaikan pada masing-masing Kementerian. Kemudian adalah penyelesaian sengketa lahan, pengakuan dan pemberian hak, mengenalkan hak pengguna atas tanah, kepada masyarakat adat yang ada di kawasan hutan, yang ijinnya kami keluarkan ketika terverifikasi ketika kita ingin keluarkan hak pengguna atas tanah masyarakat adat, begitu juga untuk masyarakat yang hidup di kawasan khususnya hutan dan perkebunan yang sudah lebih dari 10 tahun, supaya tidak ada masyarakat

an hadir sehingga kami kenakan hak pengguna, kemudian awarkan mediasi, dan maaf kami juga siap mengeluarkan esaiskan konflik pertanahan melalui jalur pengadilan, kita akan melakukan peran proaktif untuk memediasi, dan selain itu proses panjang dan tidak dimiliki data-data, sementara data itu ada di BPN, dan kami mendorong adanya proses sertifikat aset Pemerintah, BUMN, dan Pemerintah daerah sehingga tidak menjadi sumber konflik dan bisa semestinya tidak dimungkinkan perebutan lahan antara satu Kementerian dan lembaga yang lain.

Kemudian redistribusi lahan termasuk pendaftaran tanah, kami melakukan perpanjangan HGO dan HGB bagi BUMN, kenapa kami ambil kebijakan ini karena informasi tentang berakhirnya HGO HGB itu saya kira sangat efektif sampai lebih dulu seketika dia habis tanggal 22 Januari maka jam 00.00 sehingga 00.01 sejumlah orang masuk ke kawasan ini, karena proses administrasi yang lambat akhirnya tidak bisa.

Saya kira kita untuk swasta mengevaluasi, manakala selalu menimbulkan masalah untuk masyarakat sekitar maka kami akan melakukan penghentian HGO swasta, dan ini pedoman, dan koperasi tanah juga kita tawarkan sebagai satu bentuk bahwa mempercepat lahan bagi masyarakat, dan kami kekurangan adanya tenaga juru ukur makanya ketika ada moratorium kami meminta pengecualian, kami mengoptimalkan juru ukur yang ada, dan kami bekerjasama dengan seluruh fakultas Geodesi untuk merekrut mahasiswanya untuk bisa menjadi juru ukur.

Kemudian standar pelayanan juga sedang menyusun tarif satu kali datang, dan kita tidak mau melakukan proses...(suara tidak jelas), hak atas tanah kami juga mau merubah perona berbasis pada desa atau kelurahan atau wilayah.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Prona selama ini adalah pada segmentasi masyarakat, itu didanai oleh APBN, akhirnya setiap desa ada 27 orang, tahun depannya hanya 30 sehingga itu mereka orang yang berhak, karena segmentasi pendekatannya sehingga tahan pada segmentasi itu, akhirnya kita lakukan proses akumulasi berbasis desa atau kelurahan sehingga program yang kita lakukan bisa mempertimbangkan aspek kawasan.

Kemudian sertifikasi terhadap aset negara termasuk juga sertifikasi pondok pesantren, rumah ibadah, dan panti sosial, dan yang menarik kami coba sampaikan ini sebagai jawaban, ada dimensi tanah, karena eksistensi perlambangan dari rumah ibadah, pondok pesantren, bakti sosial, yang belum mendapatkan sertifikasi, dan soal tanah wakaf untuk kuburan itu juga bagaimana ini menyelesaikan...(suara tidak jelas), yang dulu dibiayai Pak Mangindaan kita fungsikan.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Ada pembenahan dan lahan, saya kira ada 10 kota dan nanti bisa kita bicarakan dan ini saya kira teman-teman dari tata ruang akan memproses juga mereview tata ruang yang tidak dilaksanakan oleh sejumlah daerah, kita mulai dari perbaikan regulasinya. Kemudian bagian 1e adalah kita akan coba membuka diri dan hal yang coba kita lakukan dan jika kantor pertanahan belum mampu memberikan pelayanan tapi mendorong supaya bapak dan ibu memulai mengurus tanah dari kantor pertanahan, kemudian lamanya waktu masih terhambat, dan kita minta jajaran Kementerian untuk bisa menyelesaikan dan hampir beberapa hal yang bisa kita lakukan, beberapa tanah, dan terakhir tanah di Cijeruk, tanah Bung Karno, itu bayangkan tanahnya itu atau penukaran lokasi, betapa misalnya tanah saya katakan bahwa kalau proklamator dan Presiden tanah bisa dipertainkan apalagi yang lain, kemudian 3 hari kita bisa selesaikan, dan upaya pembenahan yang dilakukan adalah upaya untuk memastikan kalau ada yang sertifikat yang keliru nama, salah letak harus diselesaikan karena itu menjadi program, dan kemudian ada proses pelepasan yang perlu kami dorong, memang belum terbiasa masyarakat kita memperhatikan aspek sertifikat, karenanya kami beberapa hal yang coba

menekan potensi untuk adanya sertifikasi dan sedang kita foto, foto itu akan banyak orang yang salah, namanya bisa bisa berbeda dan saya katakan e-ktip itu bisa berjalan sistem penyimpanan data warga negaranya saya kira kami akan sangat terbantu, sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat karena itu ada di chip yang ada disimpan. Sebagai alumni Komisi II mohon maaf kalau kami adalah Kementerian yang agak aktifitas membuat berbagai peraturan sehingga diawal saja kami sudah 16 Kepmen, Permen, berbagai perubahan PP, 3 Perpres, karena ada satu pasal, dua pasal yang kami ubah karena itu yang kami anggap menghambat, dan di bagian akhir juga ada beberapa gambaran yang sedang berproses, kemudian ada contoh bagaimana kami menyelesaikan tentang satu peta tentang Kalteng atau Kalsel, tadinya ada persoalan 2 juta ha hutan, dan ketika melihat peta yang sama, masing-masing bersepakat untuk mereview kebijakan yang dilakukan dengan peta yang berbeda, ada 4 juta lahan yang ternyata bisa dalam kategori dia ada 600.000.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Ya untuk kepada kanwil dan kepala kantor pertanahan meskipun di kementerian, maka kita masih punya kanwil, kita masih punya kantor pertanahan di kabupaten/kota untuk melakukan peran aktif melakukan mempending atau menstatus-quokan sengketa lahan yang berpotensi konflik. Jadi saya kira meskipun pengadilan kemudian mengambil dan melakukan langkah eksekusi maka kami melakukan peran pro aktif untuk menghindar. Nah dari beberapa masalah yang coba kami selesaikan dengan cara melihat bagaimana teman-teman di kantor kami keseluruhan melakukan proses pelayanan dan kami juga sudah membuka pelayanan sabtu minggu. Persoalannya adalah, saya kira yang menarik adalah ternyata memang teman-teman ini sebenarnya itu memang mau melayani, mau melayani dan kemudian juga ada hal-hal kemudian tersampaikan tetapi belum terselesaikan itu banyak, ada beberapa anggota dewan juga yang sudah datang ke kantor kami, dia mengkomplain sudah 7 tahun, 5 tahun, dan sebagainya bahwa ini tetapi saya kira karena mungkin lupa dikontrol, kadang-kadang sertifikat itu sudah selesai. Akhirnya, kami tugaskan antar ke rumah yang bersangkutan ya kan? relatif sebenarnya jika saja, makanya kami mengusulkan Pak Ketua, dalam format kolaborasi tentang pelaksanaan tugas-tugas kementerian ini, kami menyediakan diri Bapak/Ibu sekalian nanti untuk mengupdate masalah-masalah pertanahan yang ada di wilayah atau dapil masing-masing. Harapan saya adalah, harapan kami karena saya pernah menjadi Anggota disini, saya kira kita akan mengupdate sebelum Bapak/Ibu datang ke daerah pemilihan mengupdate masalahnya, mengupdate beberapa sengketa tanah termasuk sertifikat yang terhalang atau terhambat karena perjalanan waktu. Saya kira yang Pak Budiman tadi sampaikan, kita sudah mau menempuh jalan majunya yang itu saya kira mungkin hanya tinggal 2 kali pertemuan saja itu suatu saat, karena saya katakan sertifikatnya sudah ada, tanda tangannya sudah, peruntukannya sudah ada, tinggal tanggalnya saja. Kalau sudah sepakat, berarti tanggal kan sudah keluar nanti, apa Pak Nurdin yang ini ya. Jadi saya kira hal seperti itu menjadi penting, karena kenapa saya menyadari bahwa peran Bapak/Ibu sebagai, ini maaf saya panggil teman-teman karena suasana sedang emosional Komisi II, tadi saya kira saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang saya kira kita buka langkah-langkah untuk penyelesaian, jadi Bapak/Ibu sekalian Komisi II tidak perlu menunggu apapun, bisa membawa masalah-masalah itu, bisa segera diselesaikan karena bagi kami adalah ternyata memang ketika disampaikan masalahnya, ya kan ketika disampaikan datanya itu dengan cepat sekali. Yang saya kira lewat twitter pun itu saya kira bilangan jam barangkali bisa kita respon dan sebagainya, ini usul inisiatif kami Pak nanti menyiapkan sebuah langkah IT sebagai penunjang, juga Pak Kurnia juga sudah menyampaikan menyiapkan berbagai perubahan-perubahan. Jadi kalau dilihat bagaimana betapa banyaknya regulasi yang sudah kami lahirkan, jangan salahkan Pak Ketua dan Wakil Ketua, para Anggota tetapi salahkan karena Komisi II mengajarkan saya untuk bagaimana melakukan registrasi. Ya maksud saya jelaslah itu kita tangkap ya kan, ketika tata ruang bisa diubah dalam 5 tahun, saya bilang

bah pasal itu, bahwa tata ruang hanya bisa ditinjau kembali

Jadi komisi ini yang mengajarkan saya memainkan kalimat dan Pak Mustafa Kamal itu hapal betul bahwa kalimat-kalimatnya.

Jadi itulah Bapak/Ibu sekalian.

Tambahan kami adalah bahwa dalam pola penyelesaian yang tadi kita memakai K1, K2, K3 sampai K5 kita sudah inikan menjadi hanya 2K saja. Jadi ada K1 dan K2. Jadi semuanya kita ingin selesaikan di Kementerian, tidak ada yang kami lemparkan kepada yang lain, tidak ada yang, dan kami akan melakukan suatu proses yang menguatkan keberanian, menguatkan kesadaran masyarakat untuk hak atas tanah.

Saya kira itu saja Pak Ketua, Pak Wakil Ketua apa yang bisa saya sampaikan. Ya saya kira ini sebagai awalan dari yang pertemuan antara rapat kerja kita pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dengan penjelasannya. Mungkin masih belum pas betul, tetapi masih lebih pada Pimpinan Komisi tetapi inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kira posisi kementerian ini menjadi kementerian yang menjadi kalau pemain bola itu ada di Libido, dia tidak di depan tetapi tidak di belakang, tetapi tidak ada program pembangunan yang tidak membutuhkan lahan, hampir semua, sehingga saya hadir di semua rapat koordinator menteri, Menko Maritim mengundang, Menko Ekonomi apalagi Menko Polkam juga Menko Kesra juga, karena kami akan memberikan keringanan dengan pemberian pembebasan biaya pengurusan hak atau surat-surat tanah bagi pemegang keluarga sejahtera. Jadi kita coba melakukan apapun yang bisa kami lakukan, tetapi memang betapa masih banyak hal-hal yang harus kita benahi tetapi kita fokus kepada pelayanan dan penyelesaian sengketa dalam semangat untuk memastikan dan memberikan kepastian tentang hak atas tanah bagi masyarakat dan kita semua.

Baik.

Terima kasih Ketua dan Wakil Ketua, Bapak/Ibu sekalian.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri.

Saya kira sebagaimana yang kami katakan tadi, masing-masing fraksi paling lama 10 menit. Diatur saja, mau 4 orang pembicara, mau 5 orang pembicara, mau 1 orang terserah, nanti paling lama kita sudah akan berakhir ya 1 jam, kalau 100 menit ya lebih kurang 2 jam, kalau bisa ya itu paling lamanya, kalau bisa ya 5 menit sudah cukup agar kita bisa berakhir sebelum magrib, sudah terbuka saya kira.

Kami persilakan, tadi bisik dari para anggota, jangan yang terbesar dulu, kadang-kadang diganti Ketua begitu, diambil dari yang tengah, tidak apa-apa, kita putuskan saja.

Kami persilakan, inikan sudah siap kita semua walaupun materinya.

Dari Partai Demokrat, sudah siap?

Ada?

Oh ada.

Kalau tidak, wakil ketua, Pimpinan begitu.

F-PD (Ir. FANDI UTOMO):

**Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang yang saya hormati.**

... kami Pak, satu surat hijau. Saya kira itu tinggal satu-satunya
...intah Daerah malah berencana by back dari masyarakat, saya
... kira ini perlu kejelasan dari tetapi saya tidak tahu Bapak ini pemutus akhir atau tidak. Ini penting Pak.

Yang kedua, saya ikut Bapak ke Surabaya itu. Saya kira dari segi pelayanan, Surabaya Barat memang bagus sekali tetapi saya lihat disparitas pelayanan di wilayah lain juga perlu meningkat tetapi ada suatu kasus ketika kami reses kunjungan kerja ke Banjarmasin, saya temukan suatu kabupaten, kota baru kalau tidak salah, luas wilayahnya kalau kita bandingkan misalnya dengan Banjar Baru Pak, luas wilayahnya jauh lebih luas, jumlah penduduknya hampir 2,5 kali, jumlah bidangnya hampir 10 kali, jumlah pegawainya kota baru itu cuman 19 dibandingkan dengan kota baru yang 49 tetapi semua kinerja di kota baru itu terpenuhi, semua kinerjanya itu hampir 100%. Artinya, di dalam konteks pelayanan hampir semua yang kalau kita datang ke Kantor BPN Pak kita kurang pegawai, kita kurang pegawai, tetapi kita menemukan suatu contoh kasus yang menarik di Kotabaru kalau misalnya kita bandingkan saja dengan Banjarbaru, itu saya kira ada persoalan manajerial yang perlu kita lihat lebih jauh, detail dan saya kira setan itu ada pada diri kita sehingga setannya bisa ketemu itu Pak.

Dan yang terakhir, sebelum saya sampaikan kepada Pak Mangindaan. Yang terakhir Pak, kita tahu kontribusi BPN itu pasti luar biasa kepada negara. Kalau tidak ada sertifikatnya itu cenderung tidak bayar pajak PBB Pak. Kalau transaksi juga PBB 10 tahun terakhir, cenderung tidak kebayar, belum yang lain-lain. Saya lihat Bapak punya peluang ini, tetapi apakah kewenangannya ada di Kementerian Agraria, paling sedikit mengentaskan kemiskinan 10 juta dari 26 juta rakyat miskin Indonesia khususnya di pedesaan Jawa, karena saya keliling dari Bayuwangi sampai sebagian Jawa Barat lewat darat, saya lihat sebagian besar lahan Perhutani itu dikerjakan oleh Masyarakat. Jadi kalau misalnya di luar yang konservasi dan di luar yang cadangan khusus itu kalau 1 juta hektar sudah bisa kita dapat, saya kira paling sedikit 10 juta orang yang bisa kita tuntaskan sekaligus dari kemiskinan. Persoalannya memang saya tidak tahu apakah itu BPN apa Kementerian Agraria punya kewenangan sampai kesana, tetapi kalau dikaitkan dengan tata ruang sekaligus saya kira peluangnya menjadi terbuka.

Saya kira itu catatan-catatan yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada 2 menit lagi.
Pak Mangindaan mau tambahkan?

F-PD (EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip):

Tambahkan sedikit Pak.

Pak Menteri dan seluruh jajaran terutama tentang pertanahan yang sudah panjang lebar dijelaskan konsepsi. Ada 1 yang sub-sub sistem mungkin tetapi menjadi masalah. Persoalan tanah dan sebagainya selalu kita terbentur pada juru ukur dan dari dulu Pak Ferry masih menjadi Anggota Komisi II kita selalu kejar juru ukur, kalau tidak selesai-selesaiannya, mungkin ada konsep-konsep baru yang kira-kira kalau tidak salah dulu kita pernah menggunakan, kita berikan anggaran, kita gunakan mahasiswa di setiap daerah dengan dicode dulu atau diberikan, mungkin itu salah satu jalan di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri dari ... kalau tidak salah dan itu tetap jalan kan itu nanti mereka yang profesional betul tetapi jangan sampai hanya gara-gara tidak ada juru ukur ketika kami kunjungan kerja kemarin ke Sulawesi Utara, permasalahannya itu-itu juga. Jadi mungkin ada

peningkatan atau baik kualitas maupun kuantitas juru ukur karena
dari suatu persoalan sangat menentukan dia putus kalau
nyatanya tentu dan kami akan mendukung disini persoalan-

persoalan yang akan ditemukan.
Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Partai Demokrat.
Kami persilakan Partai Golkar.

F-PG (Drs. H. DADANG S MUCHTAR):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat tentunya Pak Menteri bersama jajarannya,

Karena waktunya hanya 10 menit padahal persoalan, 5 menit, oh diambil sendiri ya maaf 10
menit begitu kan.

Baiklah singkat kata saja.

Jadi Karawang ini penuh persoalan tanah. Saya kebetulan adalah mantan bupati, 2 kali jadi
bupati. Yang akan saya sangat hormat kepada Pak Menteri tadi, bahwa masalah BPN akan menjadi
mediasi penyelesaian tanah. Nah ini yang harus dan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Ada 2
persoalan kasus tanah di Karawang. Yang pertama adalah antara PT Sam dengan Masyarakat, yang
kedua adalah hak pejuang, ini pejuang, para veteran yang tadi Pak Menteri mengatakan jangan melalui
hukum, saya akan berterima kasih karena ini melalui jalur hukum, siapa yang mau menghargai para
pejuang yang umurnya sudah 80 tahun, masa sih kita sebagai yang muda tidak mau memberikan itu.

2 hal itu saja Pak, tetapi yang penting karena nanti berkasnya sudah saya kasih ke Pak
Menteri. Kalau yang veteran nanti saya kasih. Tolong tayangkan, jangan terjadi lagi, kita ini negara
dikuasai oleh orang yang berkuasa sehingga rakyat saya di belakang, silakan berdiri rakyat saya di
belakang, hanya menyelesaikan eksekusi tanah demi kekuasaan itu menggunakan polisi sebanyak 7
ribu polisi, ini sudah tidak benar, dan tanahnya sekarang dijaga oleh Polisi. Nah pada saat sebelum
eksekusi, saya dipanggil kakak saya sendiri, tidak saya sebutkan namanya, pejabat negara "Dang,
tolong ikut aku. Kamu mau kekuatan kekuasaan, gue penguasa juga, karena ini orang yang top juga di
kementerian. Jadi sudahlah ngalah kau, kau habis duit kau kalah, aku diam", tetapi begitu saya dilantik
jadi Anggota Dewan rasanya hati saya terjerit itu rakyat saya yang harus saya belain. Jadi ini
gambaran bayangkan Pak mengeksekusi tanah Polisi digunakan, dilatih, dididik dengan biaya negara,
hanya untuk urusi, 100 Milyar ini eksekusi, 100 Milyar, boleh tanah Bapak tanya kepada para BPN
Karawang.

Jadi harapan saya itu saja nanti. Singkat kata karena 5 menit Pak, saya mohon dukungan
emosional yang dekat saya dengan Pak Menteri, ini saya titip selesaikan dengan musyawarah mufakat
kita mediasi, karena itu tanah itu, jalannya saya buat saya, itu harusnya namanya jalan itu namanya
Dadang Muchtar tetapi karena Pimpronnya seorang Pangdam, Mantan Pangdam, 1 sekolah, "Dang,
belum mati kamu jangan pakai tanah, tetapi walaupun ini jalan diresmikan tetap laporannya sama
kamu walaupun kamu belum, kau sudah berhenti jadi Bupati", karena ini 300 hektar, harga tanah
sekarang 2 juta Pak, sudah 6 Trilyun dia jual kosong saja. Kalau untuk menyelesaikan ini tidak kurang
dari 1 Trilyun kok selesai, kenapa sih jadi pengusaha yang sudah kaya raya seperti itu, konglomerat
dengan menggunakan kekuasaan uang dan sebagainya seperti itu.

Saya kira mungkin itu.

oleh Saan, karena 5 menit ini Pak. Jadi berkasnya saya
posisi 2 persoalan antara sengketa PT Sam dan rakyat, jangan
ada punya orang, itu yang menjadi saya sedihnya, setelah
dieksekusi baru diukur dan itu perintah Menteri, Kepala BPPN diam, mana ada setelah dieksekusi yang
seyogyanya menurut Kepala BPPN tentu dulu batas patoknya barulah dieksekusi, ini setelah
dieksekusi dengan dijaga oleh Brimob, baru dia gambar, gambarnya baru jadi, itu perintah menteri,
saya bukan menjelekan Pak Menteri, maaf, waduh begitu sedihnya saya. Menteri Agraria Pak, tetapi
bukan Bapak, bukan, kalau Pak Menteri saya sudah tahu jiwanya, jelas.

Jadi mungkin itu saja Pak. Nanti berkas saya serahkan, ini cepat bisa diselesaikan mediasi, itu
rakyat dengar, ini saya Pak Saan, semuanya akan belain Saudara demi kepentingan, dia bayar pajak
selama 20 tahun lebih Pak, saya bupatinya tahu, di letter c kepala desa tanah itu milik mereka dan
mereka punya sertifikat dan bukan rakyat saja Pak pemilik, rekaman terputus.....

F-PG (Drs. H.A. MUDJIB RAHMAT):

Tanah itu milik mereka, bukan rakyat saja, Pak Tomy winata pun 20 ha tanah yang sekarang
dikuasai, tapi jamannya Pak Tarman sehingga untuk...(suara tidak jelas), perang dunia kan, di pakai
hanya mengusir rakyat, ini jangan terulang di jaman Pak Jokowi ini, alat negara digunakan untuk
kepentingan orang yang punya duit, dan berkas ini sudah ada, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatu.

KETUA RAPAT :

Masih ada 1 menit lagi untuk Golkar.

F-PDIP (BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil):

Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, pertama ini soal yang khusus di jawab kasus
tanah pengkok, dan lebih tua dan tanah ini lebih tua dari negara, tapi tanah bengkok ini tidak bisa
disertifikasi juga, karena kalau disertifikasi siapa yang mau tanda tangan, lurahnya terbatas waktunya,
tapi ini tanah yang bermanfaat dan terus-menerus dikelola oleh desa, dan ini kelihatannya ini ada
khawatir isu bahwa tanah bengkok ini akan menjadi khas daerah, kalau itu menjadi khas desa ada
ketentuan kalau itu kas desa kalau 30% yang bisa digunakan untuk memberikan insentif atau apa
namanya pada perangkat desa.

Yang kedua, struktur organisasi segera sampai ke daerah dan biasanya meletak dengan
pemda, yaitu ciptaru dan banyak persoalan disana kalau tidak diselesaikan nomenklatur ini. Yang
ketiga, sama dengan pak Dadang lebih mengedepankan mediasi, jadi mediasi di tengah ini, dan saya
kira bagus sekali, banyak sekali yang dia tanahnya punya sejarah yang luar biasa tapi formalitas
administratifnya kalah, kalau Pak Dadang ada di Kerawang di daerah saya di Semarang yang
pelebaran bandara itu sampai sekarang masih menjadi masalah, dan belum selesai termasuk mungkin
tambah kita juga, itu masa tanah sekarang dihargai 2000/meter itu di belakangnya bandara, kalau kuat-
kuatan data itu kalah, mbah saya yang sudah ada disitu sbelum ada bandara sama sekali.

Terakhir berkaitan soal, lalu anggaran pak Menteri bagaimana, ini kita minta tolong, jadi
supaya jelas anggaran dimana, yang paling akhir soal daerah perbatasan itu gagasan kita sama Pak
Menteri, bahwa kita ingin daerah perbatasan itu menjadi etalase terdepan dan martabat bangsa, jadi
kita berharap daerah berbatasan yang tipologinya ada 3, kita lebih baik dari mereka, mereka lebih baik
dari kita, dan yang ketiga *win win*, karena itu disampaikan di rapat kabinet, bagaimana kalau daerah
badan pengelola ini tidak akan efektif kalau tidak satu waktu, tidak satu manajemen, tidak satu
anggaran, itu susah, karena itu kita berharap daerah perbatasan itu diubah sehingga penanganannya



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

gainya, jadi dalam 5 tahun ini daerah perbatasan itu menjadi negara itu adalah martabat bangsa kelihatan di daerah

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

F-PDIP (Dr.Ir. WILLY M. YOSEPH, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Saya ucapkan selamat kepada BPN yang menjadi Kementerian Agraria, ini satu aspirasi perjuangan komisi II mengingat kami juga mentok ketika membahas soal tanah dari masyarakat bawah, ternyata BPN terlalu sedikit dan kecil ruang lingkungannya dan diharapkan dengan Kementerian baru ini menjadi luar biasa kinerjanya. Ada 9 juta ha tanah yang bisa menjadi sasaran objek reforma agraria, bagi saya tidak sekedar administratif tapi ini kerja revolusioner, ini ukuran apakah kita bisa mengurangi koefisiensi ini yang di desa kita yang sampai 0,6, artinya melampaui rata-rata ketimpangan sosial nasional kita yang 0,42, artinya ketimpangan itu sampai 0,6 sudah melampaui titik redaksosial, jadi kerja 9 juta ha menurut saya transformatif, karenanya saya mengusulkan Kementerian agraria bekerja seperti Kemendagri kemarin bahwa dalam menyelesaikan ketimpangan memakai pendekatan non birokratis tapi juga lebih partisipatif, dulu Kementerian Dalam Negeri mengenal fasilitator PNPM pedesaan, saya berfikir alangkah bagus 10.000 juru ukur kapastitasnya bukan kapasitas juru ukur teknis saja tapi mereka melakukan kapasitas building sehingga mereka mencapai kualifikasi sebagai fasilitator pendamping masyarakat desa dalam menyelesaikan soal agraria, terlebih dengan adanya Undang-undang Desa persoalan aset strategis di desa itu bisa diselesaikan di level desa, lewat musyawarah desa, masyarakat petani di desa itu didampingi oleh fasetor pendamping seperti PMPN atau Kementerian PU PMPN perkotaan jika 10.000 bukan sebagai juru ukur tapi sebagai fasetor pendamping jadi kerja akan jauh lebih mudah karena pendekatannya bukan teknokratis tapi partisipatif, jadi tolong diperhatikan dan saya akan perjuangkan anggaran 10.000 bukan pengadaan juru ukur tapi fasilitator pendamping masyarakat untuk menyelesaikan soal agraria, dimanapun reforma agraria di dunia ini tidak pernah menjadi sebuah kerjaan top down teknokratis birokratis, dia selalu menjadi kerjaan publik, untuk itu publik harus meningkatkan kapasitasnya, ada pendamping masyarakat, kartu yang saya usulkan 10.000 ini diukur, saya kira itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Masih ada 2 menit lagi.

F-PDIP (Dr.Ir. WILLY M. YOSEPH, M.M.):

Ketua, Menteri dan jajarannya,

Tadi sudah disampaikan, perlu diketahui bahwa ini sudah 2 periode, ditambah lagi periode Jokowi dan JK, dan menurut masyarakat dan harapan dari masyarakat Kalimantan Tengah agar ini intensif dibahas bersama dengan Pemerintah Kalimantan Tengah untuk kita segera menyelesaikan yang sudah masuk ke 3 periode Presiden, kedua tata batas, ini untuk kabupaten karena ada 8 pemekaran di Kalteng pada tahun 2002 ini juga sangat rawan konflik, oleh karena itu ini juga bagian yang menjadi perhatian dan saya senang sekali apa yang disampaikan Pak Menteri diharapkan adanya Peta dari BPN, mungkin juga nanti pertambangan, karena masing-masing memegang peta, apa memang disengaja menjadi bahan pembicaraan, dan yang dirugikan menjadi bagian Kementerian

menyelesaikan semua masalah pertanahan, tadi teman-teman
gan, tapi ini sudah menyangkut tata batas provinsi dan
lum mampu untuk melakukannya, dan ini menjadi perhatian,
agar konstitusi yang terkait dengan tata batas tentu mampu menyelesaikan ini dalam kurun waktu
pemerintahan Jokowi-JK, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Nama saya Willy, fraksi PDIP A-220, daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Willy.
Dilanjutkan Nasdem.

F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKARIE, SH., MH):

Terima kasih.

Saya lihat tinggal menunggu realisasi saja, dengan demikian yang pertama sudah kita lihat
program perona, dan dulu waktu tahu tauhn 1990an itu kan ada sertifikat yang dikeluarkan dengan
kamar bola yang ini juga yang akan banyak membuat terjadi, sehingga dia mengajukan lain sehingga
timbul sertifikat ganda, dan perlu diprogramkan untuk dia lebih dipercepat supaya punya rasa ... karena
ini salah satu masalah.

Yang kedua, berkaitan dengan tata ruang, saya bersyukur tadi ada terobosan berkaitan
Sempadanm saya pikir itu sangat cerdas, ini kesempatan kita tidak dijaga tidak boleh, sehingga orang
dari negara sebelah mengambil, kalau mereka bertanggung jawab bahkan dapat hasil dari situ maka
akan mereka jaga, tapi juga yang perlu menjadi perhatian kita tata ruang kita Kalbar Pak khususnya
sejak saya dari DPRD dulu, belum kelar tata ruangnya jadi banyak akibat kita membangun daerah
sempadan itu akibatnya tersandung dengan hutan lindung, dan ada daerah-daerah jalur kita yang mau
kita bangun ternyata mau ditangkap polisi karena masuk hutan lindung dan ini tentu perlu menjadi
perhatian dan banyak juga tata ruang mungkin perlu menjadi ini, termasuk dinyatakan hutan lindung.

Sedikit masalah perbatasan, ya mungkin saya mohon sejak Pak SBY sudah berkali-kali
mengajukan pengelolaan daerah perbatasan itu dibuat otoritas sendiri, memang sangat jauh berbeda
negara sebelah dengan negara kita, antara siang dan malam dan tentu pendekatannya juga menjadi
perhatian, saya pikir itu saja.

Terima kasih.

F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFI A. MUTTY, M.Si)

Terima kasih Pimpinan.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Saya mau mulai dari yang teknis, ini titipan yang disampaikan teman-teman, dulu wakt pak
Jono ada aturan pegawai BPN yang suami istri tidak boleh satu kantor, apakah itu masih berlanjut,
karena ada istrinya di kabupaten sulawesi selatan suaminya di Gorontalo, apakah masih berlanjut.

Kedua, mengenai persepsi masyarakat berurusan dengan kantor pertanahan itu lama dan
mahal, saya temukan waktu reses ada oknum yang bertindak jadi calo, saya tidak melihat paparan Pak
Menteri karena menangani praktek percaloan di kantor pertanahan, itu bagian dari reformasi, kemudian
dulu saya dengan Pak Yus pernah di kantor wapres ada pertemuan mengatakan penanganan konflik

tidak tahu Pak Yus sampai dimana hasil pertemuan yang lalu berdasarkan hasil inventarisasi dari pihak pertanahan sendiri apa persen yang selesai dan berapa yang belum.

Kemudian program Larasita, apakah masih berlanjut program itu, itu waktu saya berkunjung pas reses ada mobil-mobil Larasita yang mangkrek disitu, kemudian peralatan di mobil itu sudah tidak berfungsi, saya kira itu menjadi pertimbangan kalau Kementerian Agraria mau melakukan program seperti ini ke depan perlu dipertimbangkan seperti ini.

Kemudian sertifikasi untuk orang miskin, ini sangat bagus, tapi pertanyaannya, ada komponen yang harus dibayar ke Pemda, perolehan tanah dan bangunan, Undang-undang pajak redistribusi yang baru menyatakan bahwa diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah, bagaimana mengkomunikasikan ini, apakah penghapusan BPHTB karena sertifikat gratis akan diganti polanya subsidi dari Pemerintah pusat, kalau tidak akan berhadapan dengan Pemerintah daerah, dan Indonesia is kira.

Terakhri, program reformasi agraria yang berjalan lama, apakah sudah ada evaluasi, dan sejauhmana ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, artinya jangan diterjemahkan untuk pengsertifikatan tanah, kalau dia pengsertifikatan tanah maka dia bukan bagian dari regormasi, tapi apa vedanya dengan perona, jadi harus ada upaya lanjut dari Kementerian agraria orang yang telah disertifikatkan tanahnya itu dibrdyakan sedemikian rupa sehingga aset yang berupa tanah bisa berhubungan dengan bank untuk urusan mpdal, Kementerian Pertanian di daerah untuk peningkatan produksi, apakah ada program ke arah itu, itu saja Pak Menteri, terima kasih.

F-NASDEM (Drs. TAMANURI, MM)

Ada sambungan dikit Pak, terima kasih Pimpinan.

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

Sesuai hasil beberapa bulan lalu, bahwa di Lampung bagian sengketa tanah, ini tentu diakibatkan tidak jelasnyua yang diketahui masyarakat, oleh akrena itu mungkin sebaiknya diadakan pengukuran ulang sehingga masyarakat athu, karena ini terjadi dari tahun 1982, kalau turun ke bawah bersama itu tidak mau, jadi oleh karena itu melalui kesempatani ni bapak bisa mencatatnya, kemudian hasil kami reses di Ujung Pandang itu kekurangan ada alat ukur sudah terlalu tua, jadi tidak terlalu baik, dan ada titipan dari Batam bahwa memohon supaya kekuasaan otoritas Batam jangan melebihi apa yang ada pada walikotanya dan fungsi ini diberikan pada wakil walikotanya, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, kita lanjutkan.
Silakan saudara Lukman Edy.

WAKIL KETUA (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si/F-PKB):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Pak Menteri dan jajaran,
Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi II yang terhormat,

menjelaskan bunga-bunganya tapi langsung pada substansi, pertama soal visi dan misi Kementerian agraria, kita ingin visi Kementerian Agraria ini menonjol visi kesejahteraan, karena terus terang Pak Menteri tidak ada kesejahteraan bisa dicapai tanpa memiliki tanah, jadi tanah itu penting sekali, soal tanah itu soal agraria, dan bukan saja penolakan atau kepastian hukum tapi dalam rangka memperbaiki nasib rakyat.

Yang kedua, khususnya antara perusahaan dan rakyat, saya sepakat bahwa ada kebijakan dari Pemerintahan ini untuk meninjau kembali HGU yang sudah berakhir, tapi saya kasih catatan bahwa selektifitas meninjau kembali HGU ini bukan saja kepada swasta tapi BUMN jangan sampai BUMN dianggap malaikat, di tempat saya sudah digelari Belanda baru karena perlakukannya lebih sadis dari swasta-swasta karena membawa atas nama negara, dan praktek menindas rakyat seperti yang ditampilkan Pak Dadang itu nyata dan perlu Pak Menteri ketahui bahwa Riau ini kan perkebunan luas dan ini adalah tahun-tahun berakhirnya HGU yang ada di Riau karena sudah 30 tahun nanam sawit disana, 30 tahun wajar karena masyarakat disana belum ramai dan belum ada kultur perkebunan dan hari ini masyarakat kita sudah banyak sehingga kalau diberi kepercayaan oleh masyarakat insya Allah kultur sudah terbentuk, dan sudah saatnya kemudian Pemerintah melihat sebagai prioritas utama dan masyarakat di Riau, di Sumatera yang umumnya masa tanam pertama dan harus reflending, dan ini perlu di perhatikan betul, dan kita minta transparan seperti Pak Menteri katakan tadi bahwa ada pihak yang mengetahui lebih banyak karena Kementerian BPN mengumumkan saja kepada publik, bahwa ini persoalan yang berakhir daripada menimbulkan sengketa pada masyarakat, sehingga kemudian terjadi konflik di masyarakat, dan sebenarnya informasi ini bukan informasi rahasia tapi milik publik, ini perusahaan perkebunan ini ada 50.000 ha, masa tanam sudah habis biar Pemerintah disana dan masyarakat bisa merencanakan untuk apa selanjutnya dan nanti perusahaan swasta dan BUMN berlindung dari ketidaktransparan nanti, mengurus 1-2 tahun belum berakhir, ketika masalah berakhir ini masyarakat dan Pemerintah disana tidak punya solusi apa-apa untuk menjadikan lahan ini menjadi lahan rakyat.

Ketiga, saya tertarik betul ini soal keinginan Pak Menteri untuk mensukseskan program redistribusi lahan, dan mulai dari inventarisasi dan kemudian ini harus diselesaikan segera cepat, dan ini juga kita minta Pak Menteri transparan dengan kita lagi, dan kita susun bersama langkah-langkah untuk kesejahteraan rakyat.

Kemudian yang keempat, soal perona, ini terus terang ini ditunggu oleh masyarakat, saya kira Pak Menteri harus punya keberpihakan yang kuat mensukseskan perona ini jangan ditahan-tahan, dan kita akan senang kalau kemudian di periode awal ini, ada kebijakan yang progresif dari Kementerian ini dan umumkan pada masyarakat bahwa kami ingin bagikan perona sehingga ada angin surga di tengah masyarakat, di tengah kebuntuan, tidak jelas masa depannya.

Kemudian yang kelima, saya sepakat soal program pendampingan masyarakat, karena kasus rakyat dan perusahaan pasti kalah rakyatnya, jangan mimpi untuk menang karena rakyat tidak bisa bayar pengacara, penasehat umum, mereka tidak tahu mereka mau ngadu ke siapa, jadi Kementerian ini harus buat institusi dalam rangka mendampingi masyarakat biar masyarakat ini menyewa pengacara untuk bayar Pak Rufinus ini, kecuali Pak Rufinus mau menggratiskan, ini harus konkrit, apakah dalam bentuk badan, lembaga yang memberikan tugas untuk mengadvokasi kasus rakyat baik yang punya sertifikat dan yang tidak punya sertifikat, ini preman-preman yang disuruk tekan rakyat, di Riau kasusnya banyak.

Kemudian keenam, soal tata ruang ini Presiden besar bagi Pak Menteri karena tata ruang ini kadang zalim juga, kuburan orang dibidang hutan, kampung dapur orang dibidang hutan, nenek moyang sudah berkubur disitu, karena itu bagaimana koordinasi Pak Menteri berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan menghambat pembangunan dan hak-hak rakyat.

Mohon dukungan Pak Menteri agar Undang-undang Pertanahan agar diselesaikan, karena ini amanah TAP MPR terutama TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan reformasi agraria ini

perbaharui Undang-undang Agraria ini, walau pro kontra di luar, menghendaki segera dilakukan perubahan, ada yang takut hak kepentingan di belakangnya, tapi kami juga minta komitmen mumpung komisi II juga belum menyelesaikan menjadi Rancangan Undang-undang pertanahan ini, dimana Pak Menteri hari ini dan ketuanya Pak Rambe kita bisa menyelesaikan dalam satu tahun.

Terakhir soal BPN, ini aspirasi daerah, kita tidak tahu apa sebabnya BPN Ini semakin lama semakin sentralistik, padahal ini bukan kewenangan pusat, soal pertanahan ini, otonomi daerah kenapa semakin lama urusan sentralistik, kadang kepala BPN di Indragiri hilir sana pindah ke Papua di mutasi, dan ini bagaimana urusan ini dan perlu dipertegas, dan karena dasarnya urusan pertanahan ini urusan daerah bagian dari otonomi daerah, kalau di daerah belum siap mungkin kewajiban Pak Menteri untuk melakukan kesiapannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatu.

KETUA RAPAT :

Lanjut Hanura.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM,MH):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Saya sudah banyak menyimak walau sebenarnya dari hasil kunjungan kerja kita banyak masalah, jadi kunjungan dan pembicaraan kita menjadi pertanyaan ada pidato ketua DPR pada September 2014 yang menyatakan 87 juta masalah pendaftaran ini, 45 juta belum selesai, ada sekian puluh ribu kasus yang diselesaikan hanya sekian ribu kasus, kalau saya hitung tadi minus pak Menteri, produktifitas BPN minus karena produktifitas adalah perbandingan output dan input, inputnya sudah banyak outputnya tidak ada, pertanyaan saya di Kalimantan Selatan negara ini ada tidak penambah tanah, luas areal tetap, jadi coba kalkulasi kembali apa yang dilakukan BPN selama ini, jadi saya tidak mengerti bagaimana kebijakan Pemerintah tentang sistem tanah, contohnya bagaimana sistem ini bisa mengadopsi konversi, dan konversi didalam sistem yang diatur, didalam ordonansi 2003-2008 dan saya tanya Pak Simbolon ada tidak line register, tidak ada, jadi ini malapetaka besar tidak ada line register di negara kita, pendaftaran saja tidak ada, jadi Pak Menteri menjelaskan bagaimana menyelesaikan sengketa, kalau kita jelaskan mediasi buka barang haram tapi pertanyaannya itu bukan final, kenapa Pak Menteri kita tidak angkat lembaga di Kementerian Agraria ini, sebuah lembaga jelas kalau umpamanya manusia di BKO kan dari pengadilan begitu juga pidananya, banyak sengketa Pak Menteri, saya kasih contoh saya tidak mengerti pak Menteri mengatakan bermediasi sementara ada PP 24 yang mengatakan BPN ini tidak bisa mengintervensi satu persoalan yang dalam persoalan padahal dia peroleh dari hasil lelang, dan ini contoh jadi bagaimana kita memediasi sementara kita dibatasi Undang-undang yang mana kita tidak bisa mengintervensi ini, saya tidak paham, kok bisa kita mengintervensi mediasi tetapi ada proses lelang berjalan dia dapat melalui hak tanggungan begitu dia muncul namanya peradilan pura-pura, dia menggugat dan menjadi transaksional dengan orang-orang, ini banyak sekali terjadi, jadi saya meminta sidang ini lembaga peradilan, itu menjadi final putusan, kalau kita mediasi antara A dan B yang nanti umpamanya di pengadilan yang terjadi, dia punya tanah yang saya gugat begini, dan ini namanya peradilan pura-pura.

nesia dengan teman-teman melakukan kooperasi ke Afrika, an buat kita yang perlu disampaikan mengenai line register, sikan, ada kepastian hukum disana, kalau ada sengketa kalau sistem peradilan ada, kalau tanah ini ada itu final bainding tidak ada yang bisa, karena sering BPN diubah, dan kadangkala dari BPN pura-pura mau dan pura-pura tidak mau, jadi dalam kesempatan ini melakukan restrukturisasi sistem, jadi harus kita bangun struktur yang benar, dan kita bangun sustansi, substansinya tabrakan, di satu pihak kita maju tapi di lain pihak ekor kita di pegang oleh PP ini, jadi tidak benar kalau bisa kita bermediasi.

Jadi itu yang bisa disampaikan, dan nanti ditambahkan teman saya Pak Frans, masalah banyak sekali masalah dan dalam kesempatan ini kalau Pak Menteri berkenan suatu ketika saya mohon waktu karena satu hal yang dalam BPN sendiri di luar sebuah permainan, biasanya notaris, Pak Menteri kalau berkenan saya mohon waktu, saya tidak suka melempar pisau ini di forum yang terhormat ini, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak.

F-HANURA (Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Bapak Menteri Agraria dan jajarannya,
Rekan-rekan Komisi II yang saya hormati,**

Saya membawa aspirasi dari masyarakat tulang bawang, Lampung I, terkait HGU, jadi HGU ini informasi dari orangtua kami yang pernah menjadi Bupati Tulang Bawang yaitu HGU 86000, dan berakhirnya tahun ini 2016 sama seperti yang dikatakan tadi, permasalahannya mereka garap 124.000 Ha, dan HGU mereka hanya 86.000 Ha, kelebihannya adalah itu tanah adat nelayan dari masyarakat Tulang Bawang, dimana orangtua sendiri yang masa berlakunya 50 tahun, terjadi konflik luar biasa karena dengan adanya masalah tanah ini masyarakat terjadi tekanan luar biasa termasuk pilgub, pilkada, pada saat orangtua menjadi Bupati Tulang Bawang sudah ada perjanjian tertulis bahwa ini akan memberikan cash care 1 desa 1 miliar, dan pada saat jatuh tempo tidak diberikan itu, disitulah memuncaknya orangtua kami, karena orang tua kami merasa dilecehkan oleh para Muspida saat itu, dan ini berbeda luas lahan berdasarkan ijin yang terbit tahun 2004, hal ini sesuai dengan surat yang dilakukan BPN tanggal 8 Maret 2007, PT Sumar Grup memiliki total hak HGU 86.000 ha, jumlah total yang dimiliki Sumar Grup 124.000 ha, jadi ada selisih sekitar 34000 sekian, kalau kita aturannya melalui Pphnya negara dirugikan 16,7 triliun, untuk itu harapan Tulang Bawang meminta dengan Pak Menteri supaya diukur ulang HGU, karena luar biasa pemilik liberal Yusuf ini, PT SGC ini, bayangkan Pak Menteri masa Tulang Bawang tanah-tanah kramatnya itu masuk HGU Tulang Bawang, tidak masuk akal Pak Menteri, penyandang dana para bupati walikota di Lampung termasuk juga Gubernur yang jadi sekarang ini, saya sudah kirim surat ke Pak SBY kalangkabut karena apa disitu ada salah satu ada Gubernurnya, yang mana Bapak kandung si Ridho Gubernur Lampung, luar biasa, jadi perkiraan saya 2016-2017 ini penanggulangan semua, itu jadi harapan saya Pak Menteri jadi saya mohon Pak Menteri datang ke Lampung, karena itu dapil saja juga, kampung saja juga, termasuk juga kampungnya Pak Hendy Yoso, kampungnya Pak Tamanuri juga, cek lokasi disana, permasalahan HGU 30 tahun berbagai daerah provinsi ada 25 tahun dan segala macam, apa hasil HGU yang diberikan masyarakat sekitar selama 30 tahun itu kalau bisa kita urutkan dulu selama 30 tahun itu HGU

tidak ada khususnya Tulang Bawang ini, jadi harapan saya enanyakan termasuk juga Tulang Bawang mereka tutup mulut BPPN pusat juga, karena ini libatannya terkait juga dengan kepentingan negara ini, kalau negara ini mau benar ya dari sekarang kita benahi negara ini, kalau mau hancur ya hancur saja sekalian, itu saja kasihan masyarakat saya, bapak saya itu sampai dibawa ke Sumar group, begitu bapak saya tahu mendukung ...apa mendukung pemerintah, mendukung rakyat ada beberapa lambang mereka baru tahu, ternyata selama ini yang diisukan bapak saya dibawa ke Sumar group ternyata bohong belaka.

Nah itu Pak Menteri permasalahannya, jadi harapan saya Pak Menteri bisa hadir ke Lampung, cek HGU ada berapa, ukur ulang kalau memang aturan dari BPN, BPN tidak bisa ukur ulang karena harus ada permintaan dari perusahaan aturannya dari mana, kalau memang itu, iya berarti masyarakat akan sokongan meminta persetujuan dari BPN Pusat dalam hal ini Kanwil BPN Lampung dan Kanwil BPN Tulang Bawang untuk mengukur ulang, masyarakat sana siap sokongan dana, tapi kalau dibawa ke ranah hukum dia kalah Pak Menteri sesuai dengan yang dikatakan abang saya Pak Lukman Edi, kalah Pak Menteri, pembalasan Pilkada mereka tidak bisa keluar digali 2 meter, kedalaman 2 meter, panjang 2 meter tidak bisa mereka keluar dari sana, pintu masuk saja dijaga ketat di ...group itu, 70 kilo kedalaman, lebar 25 kilo, berapa? Setiap tahun itu 11 bulan sekali mereka panen 500.000 ton gula, memang penghasil gula 20 persen untuk Negara, tapi untuk masyarakat sekitar tidak ada kontribusinya kesejahteraan kemakmurannya.

Janjinya aspal mau dijalanin mau di hotmic ternyata tidak Pak Menteri, betul Pak Menteri saya tidak bohong itu, Pak Tamanuri tahu, ini kita bicara serius ya, karena terus terang saja karena Tulang Bawang ini wilayah saya Pak Menteri, leluhur saya ada di sini Pak Menteri, kalau saya tidak membawa ini saya marah dikeluarga saya. Pak Yuswan itu orang Tulang Bawang Pak Menteri, jangan diam saja beliau itu, kita seolah-olah membantu orang Lampung, ini Pak Menteri saya sedih juga. 16,7 trilyun pengeluaran pajak di SGC, luar biasa Pak Menteri, jadi intinya saya mohon dengan sangat Pak Menteri kapan ada waktu bias hadir ke Lampung Tulang Bawang keGroup, bila perlu kami juga Komisi II bisa hadir mendampingi Pak Menteri kita ukur ulang berapa tanahnya SGC, berapa tanahnya tanah ulayat.

Begitu saja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan lebih kurang saya mohon maaf.

Bilahlitauhiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETA RAPAT:

Oke terima kasih.

Yang terhormat Saudara Frans, ini kita berikan waktu sebab sudah dari 3 hari yang lalu meminta kepada Pimpinan, agar beliau menyampaikan ini, jadi ya saya akan izin sama Pak Wahidin sama Pak Lukman Edy, saya jadi sedih mendengar cerita ini, sebenarnya banyak ini cerita ini, jadi Saudara Menteri di kampung saya juga ada juga, kalau saya ceritakan nanti panjang urusannya, nanti harus kita buka Rapat Dengar Pendapat. 7 kilo meter pangang bunga nanti orang memberikan ucapan selamat, karena berhasil itu kan. Kami persilakan yang berikutnya PAN, tapi waktunya kita konsisten ya?

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, Anggota Komisi II;

ormati;

sebenarnya luar biasa, saya yakin betul kata Pak Budiman tadi, biasanya eksekusi yang selama ini terbatas kita karena beliau ini mantan dari Komisi II, tahu persis masalah pertanahan.

Dari program yang saya lihat tadi misalnya program pelaksanaan tata ruang, perlindungan terhadap 2 juta lahan sawah, ini sungguh luar biasa, yang mau kita perdalam sebenarnya implementasinya Pak Menteri, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kalau mau kita pikirkan lagi Banten misalkan, Banten itu banyak sawah-sawahnya berubah menjadi lahan industry, nah yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Menteri dan jajaran kira-kira apa hal yang paling jitu untuk menghentikan semua perilaku pengusaha yang merayu rakyat, dengan iming-iming membeli sawah yang mahal ternyata itu sebenarnya membuat beban hidup mereka hanya sebentar saja, senang kemudian menjadi susah payah.

Nah ini yang selama ini tidak terpantau pak Menteri, banyak kongkalikong di bawah banyak juga permainan dengan aparat, sehingga yang mau kita perlindungan iu menjadi tidak bisa terwujud begitu, nah ini mungkin saya salut dan kami pasti mendukung tinggal bagaimana pengawal di lapangan bagi kami juga dari Banten juga siap, karena itu menjadi taruhan kita semua, untuk kedepan ini, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua periode yang lalu saya juga termasuk yang Tim penyelesaian sengketa tanah Komisi II Pak Menteri dan saya tahu, kalau saya tidak salah ada Tim 14 waktu itu ya? Apakah itu masih ada? Karena kalau itu masih ada yang saya tahu tata kerja yang mungkin kurang efektif Pak Menteri, nah sekarang mungkin di bawah Pak Menteri dan saya yakin kalau ada Tim apalagi melibatkan Komisi II saya yakin akan mempercepat terhadap penyelesaian sengketa tanah. Kalau misalnya itu dibubarkan kita juga mau tahu cara apa Pak Menteri lakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang begitu banyak dan ruwet itu, sehingga program-program yang luar biasa yang tadi terjawab dengan out put bahwa banyak terselesaikannya sengketa tanah, itu yang kedua.

Yang ketiga sudah disinggung oleh Pak Lukman ini tadi, mengenai Undang-undang Pertanahan, saya termasuk Panjanya Pak Menteri. Di ujung masa sidang yang terakhir sudah kita mau ketok palu ternyata pemerintah yang tidak mau ada 9 Sektor atau 9 kementerian, leading sektornya adalah Menteri Kumham waktu itu, kalau saya usul sekarang leading sektornya mungkin bisa langsung Presiden kepada Menteri Pertanahan sekarang, tinggal kita mau dengar sekarang, apakah reforma agrarian itu bisa terwujud dengan adanya Undang-undang Pertanahan? Kalau materinya sangat bagus sekali Undang-undang Pertanahan ini walaupun banyak yang ingin menjegal. Saya yakin kalau lahir Undang-undang Pertanahan ini terhadap semua program Pak Menteri tadi Insya Allah akan menjawab semua itu. itu artinya akan kita menyempurnakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 60.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi kata Pak Menteri ini supaya tidak berulang-ulang lagi Pak Menteri terhadap semua Dapil kita yang punya masalah tanah, sebaiknya disampaikan tertulis Pak Menteri, sehingga kita bias membantu sebagai Wakil Rakyat sekaligus membantu pemerintah. Nah kalau itu terkomunikasi dengan baik mungkin kita bisa karena itu menyangkut kultur atau budaya, mungkin ada pendekatan lain secara negosiasi atau pendekatan budaya, pendekatan kekeluargaan itu mungkin bisa kita bantu, asalkan kita diberi bahan detail pokok persoalannya dimana, kemudian sampai dimana selama ini itu dibahas, kalau itu dilakukan saya yakin pemerintah bersama DPR itu akan memberikan kontribusi besar terhadap persoalan-persoalan pertanahan selama ini. Dan karena Pak Menteri ini adalah Alumni dari Komisi II saya tahu persis pasti akan bisa menghayati semua persoalan-persoalan pertanahan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya salut dengan terobosan-terobosan itu dan kami siap mengawal kedepannya sehingga karena kita asalnya dari tanah Insya Allah kita akan berkhidmat juga untuk memecahkan persoalan pertanahan, kembali ke tanah.

Itu mungkin dari saya Pimpinan, pasti ada tambahan dari PAN mungkin dari Pak Sukiman ataupun Bu Ammy kami persilakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata.

Nabarakatuh.

F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH., M.Kn.):

Pindah sayap ya Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Pindah sayap sebelah kiri dulu ya? Pak Sukiman ya? Tapi tuntutan.

F-PAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH., M.Kn.):

Terima kasih Pimpinan,

Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang yang saya hormati,

Pertama sekali yang ingin saya tanggapi adalah mengenai susunan nomenklatur yang baru Pak Menteri, dimana disitu lembaganya terbentuk kementerian/Badan Pertanahan Nasional. Ini efeknya nanti dalam penyusunan birokrasi sampai di tingkat kabupaten apakah mau memakai pola kementerian atau badan? Nah dari sini mungkin bias menjadi potensi timbulnya permasalahan baru karena di beberapa wilayah Pak Menteri itu masih ada yang Pemdanya memiliki Dinas Pertanahan dan ini seringkali bentrok dengan kantor pertanahannya, khususnya pada penerimaan pendaftaran hak atas tanah yang seharusnya menjadi domain kantor pertanahan tetapi tetap diterima dan dilayani oleh dinas pertanahan.

Jadi harapan saya tentunya sebagai Pimpinan yang ada di posisi paling atas bisa lebih menyeragamkan dan tidak terjadi dualisme seperti ini, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua saya sebetulnya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rufinus mengenai pengadilan tersendiri untuk sengketa-sengketa pertanahan, karena begini pak, terkadang hakim-hakim di Pengadilan negeri itu tidak terlalu menguasai tentang hukum-hukum pertanahan, betul ya? lebih baik kalau memang ditangani oleh Badan atau Lembaga yang memang menguasai betul untuk itu, karena permasalahan-permasalahan pertanahan ini tidak sederhana Pak Menteri, tidak seperti orang hutang piutang yang kemudian diambil keputusan, tanah ini komplikasi sendiri, sangat kompleks permasalahan-permasalahannya karena disitu juga menyangkut waris, saya juga sedikit mengkritisi mengenai lembaga mediasi pertanahan yang ada di BPN, terkadang masalah-masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah tetap diterima oleh BPN sebagai suatu masalah.

Contoh ini yang asaya mengalami sendiri, waktu itu saya menandatangani akte APHB pembagian waris begitu ya? Untuk pembagian waris hak bersama, kebetulan kita sudah punya wasiat yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris, jadi saat hadir di hadapan notaries mereka semua setuju, tapi pada saat mau pemecahan tanah tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dan memasukkan keberatan kepada BPN, ini diterima pak, sehingga akhirnya proses pemecahan ini tidak dapat berjalan, padahal seharusnya ini menurut saya kalau Badan Pertanahan Nasional memang sudah memegang dokumen yang lengkap, dokumen yang legitimate seharusnya pengaduan-pengaduan ini bisa ditolak, intinya seperti itu, termasuk mengenai blokir tanah ini Pak Menteri, pemblokiran tanah. Tapi ada blokir permanen. Ada blokir sementara yang 30 hari itu ya pak ya? Tapi pada kenyataannya di lapangan blokir sementara sudah lewat jangka waktunya 30 hari masih tetap diblokir tanahnya karena BPN katanya takut dan tidak berani, padahal seharusnya lewat kalau perkara itu tidak masuk ke pengadilan, seharusnya blokirnya itu gugur dalam waktu 30 hari, nah ini juga perlu menjadi perhatian.

Kemudian mengenai pelayanan ini Pak Menteri, saya sebetulnya senang sekali dengan programnya Pak Jokowi tentang revolusi mental, itu masih banyak sekali oknum-oknum yang

sudah mengundang Ombudsman mengenai pelayanan public g kejadian pungli-pungli terbesar itu ada di Badan Pertanahan perhatian khusus ini pak, di kantornya memang tidak minta pak, nanti diluar pak di sebrang ada warung kopi, nah di situ iu pak, jadi kalau di BPN nya bersih di CCTV tidak ada transaksi tetapi di luar nanti, kalau kita juga menjadi serba salah, dikasih mahal, tidak dikasih tidak lanjut prosesnya, ini juga perlu menjadi perhatian.

Kemudian ini yang terakhir, mengenai RUU Pertanahan Pak Menteri tadi juga sudah beberapa yang menyampaikan termasuk dari rekan saya Pak Yandri, apakah menurut bapak bagaimana, apakah menurut bapak ini lebih baik membuat RUU Pertanahan atau lebih baik mengamandemen UU PA nya saja? Karena kalau mau diikuti dimanapun juga UU PA kan peraturan lama banyak di situ poin-poin yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, semenantara kalau kita membuat UU Pertanahan kan tidak boleh bertentangan dengan UU lainnya, harus sinkron ini juga menjadi kesulitan tersendiri, apa tidak lebih baik UU PA nya saja yang diamandemen. Mungkin orang-orang pertanahan bisa bilang kalau UU PA itu sacral ya? Karena Undang-undang yang punya ulang tahun sepertinya hanya UU PA saja lainnya tidak, tidak ada perayaan ulang tahunnya, tapi kalau kita lihat UUD 45 saja bisa diamandemen mungkin UU PA itu juga bisa kita amandemen menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, kira-kira begitu, ya sinkronisasi hukum karena nanti kaitannya kan juga di peraturan tentang kehutanan, semua kan juga harus sinkron.

Kemudian, eh tadi saya sudah bilang terakhir ya, Satu lagi deh Pak Menteri, satu lagi, mengenai kebijakan yang sudah pernah bapak keluarkan tentang wilayah jabatan regional PPAT ya pak? Kemudian yang pembatasan pembuatan akta hanya 15 hari ya pak ya? Belum jadi ya? Oh tidak ada. Mengenai Jabatan Regional PPAT, begini pak kalau menurut saya sebetulnya kesulitan-kesulitan di depan, permasalahan akan lebih banyak timbul, karena pengecekan sertifikat itu seharusnya kan kita menyampaikan data fisik ya, sertifikatnya yang dicek, sementara kalau regional contoh taruhlah regional Pulau Jawa, misalkan saya ini Notaris Jakarta misal, PPAT Jakarta mau mengecek tanah di Surabaya ini bukankah prosedurnya nanti akan memakan waktu lama, kemudian sertifikat ini kan surat berharga tidak boleh diberikan pada sembarang orang, atau melalui kurir, sebetulnya begitu, jadi mohon dipertimbangkan lagi ini pak. Sedangkan PPAT yang ada di satu wilayah saja, satu wilayah kabupaten terkadang proses pengecekan, pendaftaran saja belum mulus ya.? Kira-kira begitu Pak Menteri dari saya, terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya kira sudah cukup ya kita lanjut masih ada Gerindra, PKS, masih ada kami persialakan Gerindra.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta rombongan yang kami hormati.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 memang usianya sudah 55 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan oleh Pemerintah Daerah, kalau toh suatu saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu diganti, maka kita harapkan agar dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Sekarang ini sementara kancang-kemcangnya tuntutan Dewan Adat untuk mengembalikan tanah-tanah adat yang dikuasai dan telah didistribusikan kepada masyarakat, kalau ini tidak diwaspadai maka bias terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, bahwa tanah itu akan

konflik horizontal di daerah, hamper setiap saat dewan adat nah-tanah adat dikembalikan kepada Dewan Adat padahal itu

2. Untuk dipertahankan Pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 5 bahwa yang berhak memiliki hak milik adalah Warga Negara Indonesia, ada hal yang menarik Pak Menteri, tanah-tanah milik itu digadaikan di bank asing, kalau suatu saat itu disita maka tentu bertentangan dengan pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria.

Bapak Menteri yang kami hormati.

Selanjutnya beberapa hari yang lalu Menpan Reformasi Birokrasi telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan kami bahwa salah satu program yang ada di sana dan saya anggap sangat menarik, adalah revolusi mental Aparatur Sipil Negara, kalau ini juga bisa diterapkan disemua kementerian saya kira bisa menghapuskan adanya sertifikat ganda di beberapa daerah.

Yang kedua *Fasum* dijadikan hal milik, ada beberapa daerah Fasilitas Umum itu tiba-tiba disertifikatkan, hal ini mungkin akan menjadi perhatian Pak Menteri terutama di Kanwil dengan Kepala Kantor yang ada di kabupaten kota. Memang kondisi calo di BPN sampai saat ini masih ada, tapi saya yakin dengan integritas Pak Menteri akan mampu membasmi hal tersebut. Keberadaan calo tentu tidak terlepas dari ikatan-ikatan Kepala Kantor Pertanahan. Rumah saya pak, 300 meter dari kantor pertanahan, sangat dekat, sehingga saya tahu bagaimana kondisi kantor pertanahan di beberapa daerah. Dan Insya Allah Pak Menteri kami akan reses pada bulan Februari yang akan datang, kami akan mencoba kembali mengunjungi bagaimana kondisi tersebut.

Selanjutnya terkait dengan juru ukur, 8 tahun yang lalu saya mengirim tamatan SMA yang terbaik untuk sekolah di Yogyakarta kalau tidak salah, menjadi juru ukur, dan itu sampai sekarang masih kerja di Badan Pertanahan, tapi kasihan sampai saat ini dia belum terangkat menjadi Pegawai Negeri, saya rasa tidak akan mungkin kita bisa menuntut disiplin yang baik, baik bagi pegawai negeri tanpa memikirkan kesejahteraan bagi mereka. Bayangkan kalau sudah hamper 10 tahun belum terangkat, saya waktu itu masih bupati merekomendasikan tamatan yang terbaik SMA untuk menjadi juru ukur, dia berada sekarang di Kantor Pertanahan Makasar.

Yang keempat terkait dengan PTP, hampir seluruh daerah persoalan PTP dengan masyarakat ini tetap memicu pertentangan antara pemerintah dan masyarakat, di Dapil saya pak, ada PTP 18 Pabrik Gula Takalar yang sudah mengorbankan jiwa masyarakat karena tanah-tanah yang ada di pinggiran PTP dianggap diakupasi oleh masyarakat, padahal setelah kita lihat, bahwa tanah itu sebagian P2 sebagian C1 yang pada waktu itu diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan kebun oleh PTP, dengan catatan bahwa masyarakat yang ada disekitarnya itu dipekerjakan di PTP tersebut. Tapi setelah berganti sekian lama, masyarakat tidak lagi diperkerjakan di tempat itu sehingga masyarakat melakukan akupasi, hal-hal ini lah mungkin yang perlu ditangani oleh Pak Menteri apalagi Kementerian Agraria ini mendapatkan 2 predikat kementerian dan badan. Mungkin tidak ada kementerian yang ada di tingkat nasional ini mendapat 2 predikat, saya tidak tahu bagaimana kanwilnya nanti apakah dia Kanwil atau Ketua Badan.

Terima kasih.

***Bilalhibissabilhaq
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Gerindra cukup?
Cukup ya? kami lanjutkan PKS.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Pimpinan dan anggota Komisi II yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Pertama saya harus mengucapkan selamat kepada Pak Menteri yang telah mendapat amanah baru jadi Menteri Agraria dan Kepala BPN, saya punya harapan besar, saya kira tidak perlu banyak diceramahi pak Menteri ini karena sebelum saya menjadi anggota Komisi II beliau sudah menjadi Ketua Komisi di ruangan ini, dia paham betul pasti tentang persoalan-persoalan khususnya tentang masalah pertanahan ini.

Yang kedua, saya punya harapan besar dengan pemaparan Pak Menteri tadi, dari yang sudah dipaparkan kepada kita, saya apresiasi dan optimis bahwa persoalan-persoalan pertanahan yang selama ini tersisa dan sisahnya itu jauh lebih besar dari pada yang diselesaikan sebelum-sebelumnya, itu akan bias dituntaskan selama beliau memimpin lembaga ini. Bapak tentu tahu 2004-2009 saya di Komisi II ini diamanahi sebagai Ketua Timja Pertanahan, di meja saya ada 2.700 kasus tanah, sampai 5 tahun selesai tidak ada satupun yang mampu diselesaikan oleh BPN pada saat itu, tentu yang bertanggung jawab bukan Pak Menteri, tapi Kepala BPN, BPN yang sebelumnya tetapi PR ini pak Menteri tahu, bahkan ada di daerah yang saudara saya tadi sebutkan sengketa tanah rakyat dengan perusahaan, bupati dan DPRD nya hadir di tempat ini siap menganggarkan biaya ukur, disepakati di ruangan ini itu sampai sekarangpun belum diukur. Jadi ini juga persoalan-persoalan menurut saya saya sangat memprihatinkan sesungguhnya. Tapi dari pemaparan Pak Menteri tadi saya punya harapan besar banyak hal-hal yang bisa diselesaikan.

Saya termasuk orang yang setuju dengan salah satu cara penyelesaian dengan mediasi, saya memaknainya mediasi ini berbeda dengan intervensi, kalau yang mau diselesaikan secara hukum dan memang sudah maju secara hukum silakan selesaikan secara hukum, tapi ada kasus-kasus yang memang tidak bisa dipaksa diselesaikan secara hukum pak. Dan saya amati 3 periode di Komisi II ini, hamper bisa dipastikan ketika rakyat berlawanan dengan pengusaha besar ditempuh secara hukum tepar semua rakyat. Tidak akan berdaya pak, jangankan membayar pengacaranya pak, ongkos datang ke pengadilan untuk lapor saja mungkin tidak kuat, jadi ini menurut saya saya setuju tidak semua diselesaikan yang paling penting mediasi itu harus tuntas, bahwa keputusan mediasi harus diikuti dengan diterbitkannya surat sertifikat itu, memang kalau cuma mediasi ngomong kanan kiri, kanan kiri tidak selesai pada saat itu, tapinitu akan menjadi bom waktu, tapi kalau mediasi menghasilkan sebuah keputusan dan keputusannya diterbitkannya sertifikat berdasarkan kesepakatan, menurut saya tidak ada yang salah di situ, justru disini yang harus menjadi prioritas sengketa-sengketa antara rakyat-rakyat yang tidak mampu itu dengan menghadapi pemilik-pemilik modal perusahaan besar itu yang harus di selesaikan.

Nah dalam konteks ini dsaya kita Pak Ketua dan Pimpinan serta anggota Komisi II kita harus dukung penuh pengadaan tentang juru ukur. Bagaimana mungkin kita bias meminta sertifikat selesai cepatr keluar, kalau yang ngukur tidak ada, rasanya sulit itu memberikan beban tetapi ttidak memberikan solusi. Nah kalau juru ukur sudah semuanya selesai, kerjanya masih lemot juga ya disitulah mungkin kita patut evaluasi secara serius. Jadi juru ukur ini menurut saya memang harus serius kita selesaikan. Kemudian Prona saya tertarik tadi, jangan lagi pendekatan persolan subyektif, tapi harus territorial, sehingga merata tanah-tanah itu memang terdistribusi pembiayaan pengurusan suratnya berdasarkan territorial, bahkan mungkin di target provinsi ini berapa, provinsi ini berapa, jangan personal karena kalau personal, bisa saja disalahgunakan juga akhirnya pak, ternyata yang ikut program Prona itu orang-orang yang sesungguhnya mampu dia mengurus surat, tapi Prona ini

...apu sesungguhnya, supaya memiliki surat dengan biaya yang

... Menteri juga tahu pernah di publish di media oleh salah satu kepala BPN sebelum pak Menteri, aka nada pembagian tanah 9 juta hektar, dan itu semua media terbuka mendengar sampai saat ini, distribusi dan pembagian itu semacam iklan panter, nyaris tak terdengar begitu, macam iklan panter pak, nyaris tak terdengar dia. Bagaimana nasibnya itu yang 9 hektar itu dimana, apa sudah habis di bagi-bagi di lingkungan BPN, atau seperti apa begitu, jadi menurut saya ini yang harus dipertanggungjawabkan secara public.

Saya setuju di era keterbukaan perlu disampaikan seperti saudara saya dari PKB tadi, tapi itu harus ada koordinasi Pak Menteri kalau tidak hati-hati pak, bias nanti rakyat menyerbu membabi buta, tanpa aturan kalau HGU nya sudah habis ini 9 hektar umpamanya, kalau beluam ada koordinasi dan penyiapan pembagian saya kira itu juha hars hati-hati, bias jadi konflik luar biasa itu karena semua orang merasa ah ini sudah habis ini hak saya di sini, hak saya disini. Jadi saya kira bagaimanapun transparansi harus diimbangi dengan juga penertiban dan pengaturan yang tuntas supaya kita menyelesaikan persoalan memang tutas tidak melahirkan persoalan-persoalan baru.

Selamat bekerja Pak Menteri mudah-mudahan Raker kita berikutnya kita mendengar yang lebih baik lagi dari pemaparan yang sekarang ini, terutama progress hasilnya dan kami akan senang kalau Pak Menteri bias mengatakan dalam 5 tahun ini kami akan selesaikan dari sekian puluh ribu kasus itu, sekian kasus terdistribusi setiap tahun terukur dan jelas, sehingga itulah sesungguhnya kerja transparan dan akuntable yang nanti oleh rakyat.

Terima kasih sekali lagi, selamat bekerja dan bertugas.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam

Terima kasih PKS, terakhir adalah Partai Persatuan Pembangunan.

F-PPP (Dr. H. MZ.AMIRUL TAMIM, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Menteri yang kami hormati;
Teman0teman Komisi II.**

Dari apa yang sudah disampaikan teman-teman dan saya kira ini sudah cukup banyak, pada sore hari ini mungkin dari Partai Persatuan Pembangunan 6tentunya memberikan apresiasi kepada kehadiran kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan. Karena sebelumnya kalau kita bicara tentang Agraria hanya ke tingkat BPN Badan demikian halnya kalau kita menyangkut masalah tata ruang dulunya hanya ditangani satu dirjen di ke PU an. Pengalaman-pengalaman yang ada mungkin saya mulai dengan tata ruang. Secara umum ini kita tidak konsekwen dengan Undang-undang Tata Ruang yang sudah pernah kita adakan. Dimana tidak berbasis pada karakter dan potensi tentang keunggulan-keunggulan wilayah dan daerah, sehingga ketika program-program ingin masuk sesuai dengan potensi dan karakter yang dimiliki oleh wilayah dan daerah itu terbentur karena tidak sesuai dengan tata ruang. Jadi untuk memberikan apresiasi kalau Pak Menteri mungkin memberikan prioritas terhadap revisi rencana tata ruang wilayah nasional.

Kemudian juga bagaimana agar provinsi dan kabupaten kota ini dapat menyesuaikan, peran pemerintah saat ini saya kira ini perlu diberikan apresiasi dan di tindak lanjuti dan tindak lanjut ini tercermin lebih awal dari apa yang tertuang dalam rencana tataruang wilayah nasional. Karena ada kita

masuk di pusat kegiatan nasional tetapi dalam tata ruang dia (tan Kewilayahan) sehingga program-program nasional yang diwilayahan itu untuk mengangkat derajat atau memanfaatkan potensi wilayah daerah dan Negara itu tidak termanfaatkan benturan nya disitu, itu saya kira di tata ruang.

Kemudian persoalan lain tidak sedikit pelanggaran terhadap tata ruang yang sudah disepakati ada di beberapa daerah dan ini terjadi baru saja di daerah kami ini tataruang yang baru disusun 1 tahun lalu, karena adanya kepentingan sesuatu itu terpaksa tataruang di paksakan untuk direvisi, itu belum cukup 2 tahun jadi sepakat bahwa untuk merevisi tataruang saya kira itu harus setelah 5 tahun, itu saya kira setelah itu harus ditegaskan.

Kemudian soal agraria saya kira sepakat saya tadi dari teman hanura bahwa memang perlu peradilan pertanahan pak, kenapa karena kasus-kasus perdata untuk pertanahan itu tahunan, sehingga tanah-tanah yang potensial itu status quo tidak terulang tidak termanfaatkan. Tercermin sebagai tanah-tanah terlantar pada hal ini tanah-tanah masih dalam status hukum sengketa. Jadi mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan ini harus segera hadir saya kira peradilan pertanahan, kalau pajak sudah ada kenapa pertanahan tidak ada dan ini saya kira, ini harus segera diwujudkan.

Kemudian soal kasuistis seperti bagaimana menata sebentar ini tata ruang atau wilayah atau menyangkut masalah-masalah tapal batas dan lain sebagainya, kasus-kasus yang seperti di daerah Sulawesi Tenggara ini karena mungkin dulu program-program patok kehutanan itu orientasinya proyek patok hutan, jadi seberapa jauh saja dipikul oleh petugas untuk memikul patok itu, begitu di capai disitu dia tancap, sehingga ketika daerah Sulawesi Tenggara itu berkembang memnjadi daerah sasaran Transmigrasi dan lain sebagainya tidak sedikit kawasan-kawasan pertanian, kawasan-kawasan pemukiman dan lain sebagainya itu ditengah-tengahnya ada patok hutan, ini mungkin perlu dilakukan bagaimana untuk perbaikan-perbaikan kedepan.

Kemudian juga tidak sedikit karena mungkin ini petugas-petugas kita di lapangan, dilihat ah ini masih tanah kosong, tidak ada orangnya dan lain sebagainya, dan sebagainya tidak dipenuhi syarat-syarat formal, Cuma mendengarkan keterangan secarik, mungkin satu dua saksi langsung pergi ukur, keluar sertifikat, setelah orang punya datang terus juga jual kepada pihak lain, ketika diukur sudah ada sertifikat di dalamnya. Ini tidak sedikit, ini mungkin perlu bagaimana pembenahan kalau mau diproses di pengadilan biaya lagi, tetapi kalau mungkin dengan bukti-bukti lain pertanahan bias melakukan eksekusi pembatalan daripada sertifikat-sertifikat itu untuk mengurangi kasus-kasus pertanahan.

Kemudian ada fenomena baru Pak Menteri ada beberapa mungkin dengan isu-isu untuk mengungkap lagi ini menyangkut hak-hak adat, jadi ini satu isu yang ingin menarik kita ke belakang, padahal sebenarnya ini kita ingin kedepan, adat yang kita maksud kedepan ini tetap juga adat, tapi adat sesuai dengan kesamaan dan kondisi, tadi dari teman Gerindra mencoba mengungkap soal untuk menunjukkan adat ini, menurut hemat kami juga kemungkinan ini potensi baru untuk bibit-bibit konflik akan datang, kalau ini kita tidak pertegas, karena amasalah adat ini terlalu peka untuk kita bicarakan. Fenomenanya ada pihak-pihak yang ingin mengangkat bahwa ini hak-hak mungkin turunan, adat atau ulayat yang ingin dia gugat ke pengadilan negeri ditolak karena tidak mempunyai bukti-bukti formal atau bukti-bukti tidak cukup, maka ada fenomena baru ini kepengadilan tata usaha Negara. Ini mendingan memanfaatkan bahwa persoalan ini belum diketahui oleh pengadilan tata usaha Negara itu belum cukup 90 hari, sehingga ini dipersoalkan di tata usaha Negara.

Ada kecurigaan masyarakat kemungkinan ini yang ada permainan antara oknum dengan orang BPN agar bisa membatalkan sertifikat-sertifikat yang sudah diterbitkan melalui Prona-Prona beberapa tahun sebelumnya, mungkin ada yang sudah 10 tahun lebih dan lain sebagainya, urusan itu kelihatannya ingin dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negeri, kemudian ini bagaimana tanah-tanah ini nanti yang setelah dibatalkan. Ini mungkin sebagai informasi untuk mungkin menjadi masukan-masukan bisa di cek lebih lanjut.

ntuk menghindari gratifikasi dalam urusan-urusan pertanahan tidak melalui tatap muka, ini mungkin memanfaatkan bank-bank gratifikasi. Kemudian perlu mungkin regenerasi dari PPAT ini karena ini PPAT sebenarnya kalau diberikan fasilitas, kemudahan, dan didukung dengan peraturan-peraturan yang kuat dan sosialisasinya kepada masyarakat termasuk biaya murah, saya kira ini peluang-peluang yang baik untuk jadinya peralihan-peralihan hak dan lain sebagainya dan masyarakat bias memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya masyarakat kita ini tidak miskin pak, kaya cuma pendapatannya yang rendah. Karena rata-rata masyarakat kita khususnya di luar Jawa itu tanahnya lebih dari 5 hektar, 10 hektar, tapi tidak punya nilai ekonomis, jadi kalau ini bisa kita dukung pensertifikatan, kemudian didukung dengan tadi Tata Ruang yang bisa memberikan bagaimana gambaran, potensi, karakter, keunggulan daeran itu dan didukung dengan infrastruktur saya kira masyarakat kita seperti mimpi Pak Menteri, ini bisa terwujud.

Demikian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saudara Menteri saya kira cukup panjang lebar yang sudah disampaikan oleh para anggota, khususnya tadi yang menyangkut persoalan-persoalan konflik pertanahan dan juga soal pelayanan kepada masyarakat, dan hampir-hampir kalau ditanya semua per dapil, Pak Menteri tadi sudah katakan bahwa nanti reses turun ke Dapil mendaftarkan masalah, bias berbi-ribu ini masalahnya, makanya kita tidak usah masukkan di kesimpulan, dengan catatan ada kesepahaman kita dan juga tadi Kementerian Agraria memberikan nanti mungkin nomor telepon para pejabat yang bias kita hubungi bersama-sama, bila perlu jika ada mekanisme yang kita cocok kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini.

Ini pengantar kami sebelum Pak Menteri menjawab sekaligus memberikan penjelasan yang menyangkut ini baru kita ambil keputusan dengan harapan sebelum magrib sudah dapat kita selesaikan Rapat Kerja kita ini. Kami persilakan saudara Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA/KEPALA BPN:

Baik terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua dan Para Anggota yang terhormat;

Saya kira mendengarkan apa yang disampaikan, menerawang pikiran saya ketika saya juga menyampaikan hal-hal yang kurang lebih sama. Ada beberapa problem-problem yang kita mencoba, kami tawarkan, kami sampaikan untuk tentu menjadi bahan pengawasan untuk kita konfirmasi. Bagi saya yang penting bahwa ada kesadaran kita bahwa kerjasama yang sinergis antara Komisi II dengan Kementerian ini bisa menyelesaikan masalah-masalah pertanahan.

Saya ingin mengajak supaya kita mengurangi cara perbedaan pemahaman.

Yang pertama adalah yang menarik saya ingin ajak nanti teman-teman Komisi II untuk melihat peta, masalah-masalah dan apa daftar-daftar seluruh tanah-tanah yang ada, siapa pemilik dan sebagainya, saya tidak ingin ini dibuka, karena ini bias dimanfaatkan informasi ini, itulah kenapa problem perpanjangan HGU bukan tidak mau dibuka, yak an, ada yang mengetahui bahwa ini akan berakhir tanggal sekian bulan ini, disiapkanlah sejumlah sebulan, itu langkah itu sudah kita inikan. Nah karenanya bukan kita tidak ingin buka, bukan kita ingin tutupi, tapi kita ingin terbuka, kepada Bapak Ibu sekalian Komisi II kita akan kasih tahu, ini loh Riau, ini loh pemiliknya, ini loh ininya, jadi saya kira hal-hal yang berkaitan informasi kita tentu akan menyampaikan tidak ada hal yang harus kami tutupi

yang tadi saya katakan, sehingga ada beberapa tanah-tanah
aker, sudah kita inikan tidak kita beritahukan, karena itu akan

Dalam perjalanan 3 bulan kementerian ini saya sudah mendapatkan sejumlah tanah, ada yang dikota, ada yang perpanjangan HGU saya inklabkan dan lain sebagainya. Itu menurut saya menjadi bagian yang penting tapi kalau kami buka ini saya kira bukan dalam forum yang terlalu seperti ini, mohon maaf kami bukan tidak mau, takut kemudian muncul masalah-masalah baru yang disampaikan, api kita akan buka itu, kepada teman-teman Komisi II secara keseluruhan.

Soal kebijakan mediasi saya kira bagi kami adalah kita memandang bukan soal intervensi benar, jadi mohon maaf tidak ada keinginan ketika masyarakat memilih proses hukum kami persilakan, tapi ketika di awal kita tidak mengatakan bahwa ini adalah intervensi tidak, mediasi itu juga yang kita katakan, kalau ada persoalan itu kita berperan aktif karena apa? Masyarakat itu kita bantu untuk mendapatkan haknya, karena ketika mediasi sudah dilaksanakan maka kita keluarkan sertifikatnya. Kesepakatan antar pihak yang bersengketa itu menjadi ikatan hukum yang saya kira bisa mengatasi ya?

Kalau soal hambatannya PP nya kita rubah, Pasal PPnya yang kita rubah bapak, ibu, PPnya kita rubah supaya tidak menjadi penghalang. PP nya kita rubah ini kan pemerintah, ada peraturan pemerintah yang menghalagi, kok dibiarkan, kita rubah, han itu saya kira, barangkali hobby kia yang rubah-rubah tapi biarkan beberapa pasal kita rubah, nah ini yang saya katakan kita ingin mengatakan bahwa proses mediasi kita kita sudah juga keluarkan, surat untuk melakukan langkah setidaknya, langkah-langkah peran aktif seluruh Kepala Kantor dan seluruh Kanwil yang pertama mengambil langkah-langkah untuk menunda proses eksekusi lahan khususnya yang terkait dengan masyarakat, jika hal itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Kedua diminta secara pro aktif mengambil langkah-langkah mediasi dalam menyelesaikan atau cara pelaksanaan eksekusi guna mencegah konflik dimaksud. Saya kira fenomena yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu betapa luar biasa maaf saya ngomong, kalau ada yang keberatan ke pengadilan dong, saya kira tanahnya bukan tanah dia, ini hanya persoalan menang di dalam sebuah proses yang menurut saya, dokumennya juga tidak lengkap, menurut saya itu. Nah ini saya kira nanti bapak ibu sekalian anggota Komisi II yang berlatar belakang hukum bisa membantu dan saya kira kaitannya juga dengan undang-undang.

Kalau ditanya Pak ketua, bapak, ibu sekalian Pimpinan dan anggota Undang-undang Pokok Agraria itu sebenarnya menegaskan dari Undang-undang colonial bahwa Negara menguasai seluruh lahan, hal hal lain tentu kita bisa melakukan proses penyesuaian dalam perkembangan dengan kita normal, itu saya kira satu hal yang mungkin. Pilihannya apakah kita merevisi Undang-undang Pokok Agraria atau kita melanjutkan, saya kira saya kembalikan, kita siap saja untuk membahas apakah melanjutkan, menurut saya hal-hal yang sudah dibahas oleh teman-teman DPR periode lalu sehingga meskipun tidak ada carry over tapi menurut saya semangatnya tidak boleh putus kan begitu. Saya kira sama melanjutkan, menggagas dengan mengatakan bahwa kita bias melanjutkan saya kira kita bisa di Baleg, kami siap untuk membahas ini, menurut saya jangan 1 tahunlah, 9 bulan selesai itu Undang-undang. Jangan 1 tahun kelamaan, nanti lewat 9 bulan saja, tapi kesepakatannya tahu kita, point-poinnya kan yang belum. Jadi saya kira cara kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita inikan, jadi ketika kita merevisi bias dengan persetujuanundang-undang, ketika kita hadirkan Undang-undang pertanahan maka kemudian kita menegaskan bahwa hal-hal yang tidak kita rubah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetap berlaku begitu loh, itu menurut saya, jadi poinnya ini menjadi bagian yang melengkapkan. Itu saja semangatnya Pak ketua.

Soal yang berkaitan dengan regional apa pungli, ya tentu kami minta maaf karena memang potensi itu terus berlangsung, penilaian saya kira kita juga tidak terima, tidak kita bantah, kita terima apapun bantu kami untuk membenahi itu. Kita menyiapkan sebuah cara untuk kita merevisi untuk dari mulai adanya satu tarif untuk mengurus ini satu angkanya sekian, mengurus ini angka sekian, lamanya sekian itu kita tidak pakai lagi rumus, "biaya itu belum termasuk, tidak pakai lagi" kita benahi itu, kita

Nah kita pakai menyiapkan juga media on line tapi bahwa saya kira ini tapi hal-hal yang sudah kami sampaikan di awal hwa terhadap seluruh proses sejak ini menjadi kementerian,

ambil keputusan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut ambil keputusan ketika landasan sudah ada.

Bahwa manusia wajar ada kesalahan tapi dalam konteks ini jangan pernah berbohong, salah saya lindungi, pembohong *no way* saya terpaksa berhenti. Itu yang saya katakan bahwa, karena apa? Karena bermula dari hal-hal yang sesungguhnya memang dimungkinkan untuk bisa terjadi manakala semuanya masyarakat juga mengatakan bahwa ah jangan ngurus di BPN, susah, mahal, makanya kota buka pelayanan Sabtu Minggu. Mohon maaf kepada para PPAT, kita tidak membuka itu untuk PPAT, kita membuka kesempatan itu untuk masyarakat mengurus langsung, kami sedang membangun *corporate image* bahwa mengurus itu tidak susah. Itu mohon maaf jadi, kami dikomplain bukan tidak itu tapi kita berikan. Kita juga sedang siapkan nanti pelayanan yang malam hari.

Jadi saya kira kami sedang melakukan satu branding bahwa ketika ke BPN mengurus surat-surat tanah tidak sudah, tidak mahal dan sebagainya, itu yang menurut saya ini. Jadi kita coba bangun ketika masih ada pungli dan sebagainya, kami tidak membantah kita berterimakasih karenanya dalam konteks perbaikan ini kami juga membuka diri jika ada hal-hal yang menurut saya kinerja-kinerja kantor pertanahan khususnya yang bapak ibu temukan di daerah.

Nah *one man police* sebagai sebuah cara kita itu saya kira satu awal ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, menggunakan satu peta, banyak yang sudah bias kami selesaikan. Kami berkomitmen untuk mereview kebijakan apapun yang ketika misalnya dari satu peta ini ada kondisi yang berbeda, kehutanan melakukan itu, kamipun melakukan itu sehingga banyak hal-hal yang coba kita lakukan, khusus barangkali berkaitan dengan batas wilayah, ini saya kira ada kabupaten kota inisebenarnya soal pemekaran ini, jadi paham betul karena kadang-kadang pemekarang itu tidak mencatat di Undang-undangnya soal secara focus dan tajam soal cakupan nama desa atau kelurahan, hanya menyebut nama kecamatan di atasnya. Kecamatan yang dimekarkan agak kedalam kecamatan yang berbatasan namanya baru, ketika dibuka oh ini kecamatan a, berarti kecamatan yang baru dimekarkan ini masuk kewilayah sebelah, bukan wilayah ini, itu banyak sekali yang saya kira terjadi, saya kira bisa diselesaikan dan itu saya kira akan bisa ketika kita nanti menyusun tata ruang.

Ketua dan para wakil ketua, bapak ibu anggota.

Soal tata ruang kita melihat bahwa tata ruang nasional itu, itu akan kita review secara keseluruhan ini akan berdampak pada tata ruang provinsi dan kabupaten, kami sedang menyiapkan langkah yang pertama adalah ketika melihat peta, sebuah provinsi maka kita tidak boleh mencantumkan nama kabupaten kotanya. Kita lihat disana ada potensi apa, kita kembangkan, kita lakukan proses apa yang akan kita lakukan dengan penataan ruang yang ada, bebas dari kabupaten dan batasnya. Ketika sudah oh ini daerah kawasan industry, ini kawasan pertamanan, dan sebagainya, baru kita munculkan batas wilayahnya sehingga akan terjadi sebuah hal yang beriringan antar kabupaten kota, itulah yang kita dorong dengan Undang-undang untuk kerjasama dengan daerah. Karena kalau kita memunculkan batas tadi tiba-tiba seperti kita arahkan dengan dengan Kutai Kartanegara, disebelahnya adalah wilayah hutan, disebelahnya adalah wilayah tambang, itu hanya karena perbedaan.

Itu barangkali saya kira nanti kita sebagai sebuah kewenangan yang yang ada di kementerian ini dan tentu tidak menjadi kewenangan teman-teman di komisi saya kira ada bagusnya nanti kita sekaligus bicara soal review tata ruang ini. Undang Menteri Kehutanan, Undang juga PU untuk bisa sekaligus, jadi ada hal yang bias kita rekomendasikan sebagai keputusan langsung, itu menurut saya jadi penting. Jadi tidak mesti harus kemudian satu koordinasi. Betapa banyaknya soal-soal yang berkaitan masalah-masalah soal tanah ini saya kira soal regionalisasi PP artinya begini, pikiran kami

tidak bias menentukan daerah kerjanya dia memenuhi syarat tingkatannya keluar, tapi dia tidak bisa bekerja hanya karena disebut penuh PPAT nya itu masalah pertanahannya juga numpuk. Kalau masalah pertanahan dia sebut penuh, masalah banyaknya PPAT, masalah tanahnya sedikit, kita masih akui, tapi ketika menjadi itu, nah inilah saya kira sejalan dengan ini maka kita buka tidak ada lagi ruang yang tertutup bagi seorang PPAT.

Kemarin kita baru menuntaskan 377, PPAT yang karena peraturan soal daerah kerja ini, mereka 4, 5 tahun menanti sampai kapan bias ini, untuk itu kita rubah PP nya. Pertama regionalisasi, nah nanti bapak ibu bisa memberi masukan soal ini tapi saya tidak ingin membatasi hanya pada satu komitmen. Saya katakan pada teman-teman PPAT bahwa Tuhan sudah menentukan rezeki pada masing-masing PPAT, Tuhan tidak akan salah alamat, yang belum adalah belum ditempel perangko saja belum sampai rezeki itu. Tidak mungkin salah alamat, dia bisa berpraktek, di Lembang misalnya dia menangani masalah di Tangerang, itu bisa terjadi, bagaimana melakukan proses ini, wah jauh dari pada kita biarkan selama ini mereka "kong kalikong" PPAT ini, dia ambil nama PPAT yang ada di wilayah ini, karena saya beroperasi di daerah kerja yang lain diambil ini dia pinjam, begitu ada masalah ditanya kepada PPAT yang namanya dipinjam, tidak tahu menahu soal masalah tanahnya, itu yang mau kita katakan. Kita mau atasi dengan regionalisasi, jadi melonggarkan sehingga sampai hari ini sudah tidak ada PPAT yang tidak mempunyai daerah kerja.

Itu yang saya katakan kita rubah PP nya, satu pasal itu saja, ada 2 pasal yang satu pasal itu pasal usia, usia kita hapuskan, bayangan 30 tahun, percepatan pendidikan, tidak mungkin kita biarkan seseorang PPAT sampai 30 tahun baru bisa berpraktek, orang ada kecepatan hari ini umur 24 tahun bisa doctor ya kan? Nah itu saya kira ketika syarat itu kita tidak biarkan dia menunggu, ada fikiran kami tadinya memagangkan, tapi kan memagangkan menyulitkan juga dia harus magang di kantor PPAT yang lebi senior ya pasti tidak semua dikasih, nanti klien saya diambil ya sudahlah, jadi langsung sajalah bias bekerja, biarkan mereka berkolaborasi, bekerjasama sebagaimana profesi. Karena ada profesionalitas yang menjadi dasar apa yang tugas-tugas mereka lakukan, dan kami mulai tahun ini akan melakukan proses menobatkan 10 PPAT terbaru, meskipun itu berdampak pada promosi kita sadari, kita akan berikan ini. "Wah ternyata ini PPAT yang dipercayai oleh kementerian ini" oh iya saya katakan itu, tapi kita akan menilai itu yang terbaik. Ini cara kita mendorong bahwa betapa profesionalitas ini.

Kami sedang juga menjajagi ini unuk teman-teman PPAT dan Notaris nantinya mudah-mudahan cepat jadi sebenarnya wilayah kerja Notaris dan PPAT itu nasional, dengan demikian mereka bisa dengan leluasa menyesuaikan. Ada PPAT yang harus menyesuaikan daerahnya dengan Notarisnya, harus bangun kantor 2 dan segala macam, dia terpaksa membuka suatu kantor di kantor satu lainnya karena di tempat yang dia inginkan itu dia ini. Notaris lebih longgar kadang-kadang mereka menempel, karena dia dapat disini, karena Notaris itu provinsi dia menyesuaikan, jadi kasihan menurut saya. Jadi ini yang kita buka sebenarnya, jadi ingin membuka kesempatan, nah kita juga tertantang untuk bagaimana pengawasannya, maka kemudian ketika on line dan IT kita gunakan kita akan bisa mengontrol, karena setiap data yang masuk itu muncul di dalam teksnya di layar pusat data kita.

Nah mengapa kita katakan ini membatasi ya kan bahwa itu menjadi 20 sertifikat perhari, 20 karena dari 15 ditetapkan 20 karena pikiran kita supaya tidak hanya tanda tangan saja, Kadang-kadang kan kalau tidak batasi, karena kita ingin itu dibaca oleh PPAT, jangan itu tanda tangan berkas saja, karena di sana ada angka yang berbeda, 46 dengan 16 sudah berbeda. Nah ini saya kira kehendak kami kalau misalnya ada tambah kecepatan 48 bisa kapan tidurnya, kapan bacanya dan sebagainya, tapi semangat kami di sana. Kami ingin katakan bahwa setiap lembar dari surat yang ditandatangani akhirnya diketahui jadi dia tahu betul, didata diperiksa betul datanya. Nah ini yang menurut saya jadi tidak ini juga, tidak menyulitkan, ini yang saya ingin sebutkan.

Berkaitan dengan bagaimana menyesuaikan betapa banyak tantangannya saya kira sebenarnya dari mulai Undang-undang dan sebagainya khusus untuk pelayanan, dan khusus untuk penyelesaian sengketa yang kami juga mengajak mungkinkah kita membikin Tim bersama, Tim

masing-masing ada otoritas yang dimiliki dengan fungsi yang maka kemudian bisa kita putuskan, kalau kita segera putuskan yang terbuka untuk itu dan akan membuka diri untuk segera mengeluarkan beberapa keputusan sebatas kewenangan kementerian ini dan sudah bisa kita lakukan dengan Batam kemarin.

Di Batam itu ada salah satu keputusan Menteri Agraria tahun 1995 yang menjadi penghambat bagi Otorita Batam. Yang saya memberikan kesempatan untuk segera diselesaikan dalam waktu seminggu atau 10 hari, muatkan pasal-pasal yang harus dirubah, karena ini Kepmen saja, saya bawa ini nanti saya teken. Ini sudah hampir seminggu, Senin besuk seminggu nanti saya kira.

Itu saya kira hal yang bias kita sampaikan, memang beberapa implementasi dari kebijakan tadi seperti misalnya bagaimana lahan awal pertanian itu saya kemarin di Grobogan, saya sudah langsung karena bagus benar kemudian luar biasa produksinya kemudian kondisinya bagus saya katakan langsung kita keluarkan pengakuan terhadap bahwa ini adalah lahan pertanian abadi. Dengan batas wilayah tertentu yang dia tidak boleh dialih fungsikan, kita lindungi artinya di dalamnya sudah ada hak-hak masyarakat masing-masing. Tapi dalam pengertian saya sebutkan tadi bahwa kawasan ini sudah bisa di ini.

Nah berkaitan dengan Prona memang kita menargetkan kita membangun sebuah target, target-target apa yang harus dihasilkan kita akumulasi bahwa Prona tahun ini, ada yang mengusulkan nanti Rapat Kerja minggu depan akan kita rumuskan mulai dari angka 2 juta, 3 juta sampai ada yang optimis 5 juta, tapi ini nanti akan kita lihat, karena kita harus tanya sama teman-teman Kanwil. Nah berkaitan dengan struktur ini, saya kira selama ini bahwa Badan Pertanahan Nasional itu yang saya kira dipertahankan oleh presiden untuk ...pada kementerian, sehingga fungsi Badan Pertanahan secara strukturalnya juga mengikuti bahwa ada dinas tata ruang, dinas tata ruang itu adalah bagian dari Kepala Daerah, perangkat Kepala Daerah. SKPD dia saya kira berbeda dengan posisinya, jadi menurut saya Kanwil atau Kepala Kantor itu yakan itu tidak ini badan tapi dalam pengangkatan menurut saya kita bukan ingin mengatakan bahwa ini stralistik, saya kira Kepala Daerah, kita berikan kesempatan untuk merekomendasikan, saya kira kita juga membangun kerjasama apa *understanding* kita begitu sedemikian rupa, jangan ini saya kira kita sudah melakukan satu proses kerjasama dengan Gubernur Jawa Timur. Jawa Timur itu membantu penganggaran dalam penyiapan juru ukur. Mereka menyiapkan, kita menyiapkan standarisasinya, menyiapkan materi-materinya untuk menyiapkan pelatihan. Dimulai juga Jember, Jember sudah megasih kita 10 M, Malang juga begitu.

Saya kira kita sangat terbuka, dan kita di bantu, *Alhamdulillah* tadi saya kira kita dengar, didukung 10 ribu, ini saya kira upaya memang percepatan karena, anggaran kita tahun ini adalah Rp. 5.623.939.170.000,- itu berasal dari BPN, Rp.4,54.583.939.170,- dan dari Tata Ruang Rp.1.040.000.000.000,- ini kita gabungkan itu anggaran kita tidak menambah tetapi memang ada beberapa yang menurut saya perlu kita informasikan bahwa misalnya seperti tadi, memang dari 1.800 yang belum diangkat ada 1.898 tenaga ukur, ini kan menurut saya kalau kita gunakan metode pengangkatan PNS itu kita tidak bisa, makanya kemarin ketika moratorium Menpan itu kita sampaikan, kita meminta pengecualian terhadap ini karena memang perlu pengangkatan juru ukur. Yang juga disana bisa menjalankan fungsi verifikator berkas, analisis permohonan hak tanah, dan penanganan laporan barang milik Negara, sehingga kita padukan fungsi sebagai itu.

Sebenarnya ketua dan Wakil Ketua, bapak ibu sekalian betapa banyak rangkaian yang masalah saya kira pada kesempatan rapat pertama ini mungkin tapi belum mampu menjelaskan, merespon semuanya, karena waktu ya nanti kami mohon maaf karena memang harusnya hari Senin kemarin rapat ini, tapi kita minta Kamis karena kami harus rapat cabinet. Saya bilang Pak Rambe ini Rapat Kabinet, agak beda Menteri kalau tidak hadir rapat cabinet kan begitu, akhirnya kita hadir, tapi saya kira nanti yang akan datang kita lebih tajam misalnya soal mungkin review terhadap seluruh kualitas pelayanan Kantor Badan pertanahan.

Saya kira khusus tentang itu sehingga hasil dari rapat itu bisa ditindaklanjuti dengan keputusan kementerian, khusus soal sengketa pertanahan, baik kita mulai dari adanya sengketa antar masyarakat

jadi salah satu, yang menurut saya itu bisa meng-guidens, kebijakan meskipun ada beberapa juga yang coba kami dorong itu misalnya seperti di Jember kemarin, misalnya ketika ada perpanjangan HGU yang kita lakukan di PTPN XII, itu ada yang kita keluarkan karena sudah ada masyarakatnya, sudah ada sekolahnya, sudah ada rumah sakit dan lain sebagainya. Sehingga perpanjangan yang tadinya dimintakan sebagaimana luas yang lalu itu kita keluarkan.

Nah itu saya kira pola itu yang sudah kita sebarakan, mungkin memang belum seluruhnya kemudian bisa dilakukan tapi kita sudah menginventarisir kapan HGU itu berakhir, kapan HGU ini dan sebagainya. Tapi menurut saya hal yang paling penting adalah ketika HGU swasta, tidak saja swasta betul, apa Wakil Ketua tapi juga BUMN karena itu juga bisa, pelakunya bisa menjadi sangat tidak ramah kepada masyarakat, itu cuma penilaian kita. Nah saya mendorong bahwa sebenarnya kalau ada Kepala Daerah yang juga sudah melakukan langkah-langkah membela HGU, perusahaan-perusahaan yang menyengsarakan menurut saya juga harus dikasih tahu, itu juga fair juga. Kan kadang-kadang tidak mungkin juga, karena efektifitas Kepala Daerah menekan PTPN ya itu luar biasa menekan pengusaha luar biasa.

Tidak ada dalam penilaian kami sementara sampai hari ini setidaknya kemampuan dan keberanian yang sangat luar biasa dari seorang pengusaha yang berkaitan dengan lahan yang tanpa back up kepala daerah, tidak ada, pasti dengan Kepala Daerah, karenanya mari kita selesaikan dengan mediasi. Itulah saya katakan bahwa mari kita mediasi, kalau kang Dadang lain agak pro rakyat dia. Jadi kita akan mediasi maksud kita adalah bukan mengintervensi tapi kita lindungi ketenangan mereka, setidaknya mereka tidak terusik, tidak terusir, mungkin belum pada pemilikannya, ada proses kita bantu menyelesaikan, tapi dia tidak terusir dulu, itu yang paling penting. Tidak terusir dulu berarti aman, itu yang saya kira kementerian ini punya sedikit kewenangan di situ akan lebih besar manakala di back up oleh Komisi II, jadi kita bias mampu menahan karena kita melihat bahwa lahan tanah ini haruslah mampu mewujudkan atau membangun keadilan ruang hidup bagi seluruh rakyat dan kita melihat tahan itu bukan serta merta pada atau hanya pada kepemilikannya, tapi pada kemanfaatan dan kegunaannya.

Itulah saya kira tadi yang mendasari kita untuk bersemangat untuk melakukan mediasi, tentu saya kira kita katakan ini adalah hal konyol saya kira, terima kasih ingatannya jika kita mediasi itu justru meng-intervensi menjadi konyol kitanya kan, mediasi kita menjadi tidak berwibawa. Maksud kita melakukan mediasi itu adalah sebelum memulai untuk proses ininya, kita mengkomunikasikan, kan lain kalau yang datang mewakili masyarakat, Komisi II dengan kementerian Agraria datang ke perusahaan itu akan lain.

Saya kira bagian menekannya Komisi II, bagian keputusannya ke kementerian kan? Itukan bagus perpaduannya, itu enak, main di situ kita mana Sumut ya? Selesai itu ya? Nah itu pokoknya tekan, tunjuk-tunjuk kan begitu, karena saya tidak boleh lagi marah-marah seperti Pak Saan, Pak Saan lebih lembut tapi sebetulnya pakai itu saya langsung keluarkan SK nya. Saya kira banyak hal yang bias kita lakukan, kita bisa uji setidaknya bisakah setahun ini kita mampu menyelesaikan beberapa sengketa-sengketa lahan yang berkaitan dengan nasib masyarakat di berbagai daerah. Okey kita target misalnya kita mulai Sumatera, bisakah kita tadi Aceh sampai Lampung kita selesaikan setahun ini, kita berkolaborasi, kita bikin strategi, supaya kita bisa ada hasilnya. Pertanggungjawaban ...kami juga melakukan sehingga, kenalnya kita, dekatnya kementerian dan Komisi II ada manfaatnya, bukan sekedar, tapi itu saya kira kita coba seperti itu.

Tapi ini baru tawaran tapi pada dasarnya kami membuka diri untuk melakukan proses bersama dan tentu menghargai dan menghormati masing-masing komisi tanpa ada saling intervensi dan saya kira kita lakukan yang paling pasti adalah bahwa untuk daerah pemilihan saya kira kita memberikan ...kepada teman-teman, bapak-ibu sekalian, ya saya maaf masih teman-teman ya pak ya? Bapak ibu sekalian untuk melakukan proses percepatan. Saya kira itu tantangan juga kan enak kalau di dapil itu, kalau ini mendorong supaya kuat, kokoh basis politiknya kan? Kalau tidak kenal masalah tanah di dapilnya ya agak susah kita mengatakan representasi kita, tapi kita akan melakukan itu. Bahwa kami

ya? Biarkan ini kita mulai menjadi kan Kantor BPN itu terang
ak ini, tapi sudah mulai kami terapkan seragamnya putih. Kita
asa, Rabu, Kamis putih, Jum'at pakai Batik, Sabtu, Minggu
pakainnya bebas rapih, pakai Jins boleh, robek sedikit oke, pakai kaos putih boleh, yang penting
senyumnya, percuma pakaiannya. Itu saya kira upaya yang coba kita lakukan.

Baiklah bapak ibu sekalian, Pak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi II yang saya hormati,
terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang belum berkenan, belum maksimum, dan kami tentu
membuka diri evry time datang ke kantor kami, kalau mau ketemu Deputi, para Direktur silakan kalau
mau datang tanpa jadwal ketemu Menteri itu jam 12.00 makan siang atau setelah magrib. Karena itu
saya kira Komisi II kan pemainnya pemain malam semua.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu;alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri, jadi jika ada pertanyaan dari anggota yang belum terjawab,
sesuai dengan catatan dari Kementerian Agraria, kiranya nanti bias dikirim kepada Anggota Komisi II
secara tertulis.

Oleh karenanya ada kami catat tadi yang terakhir pernyataan Saudara Menteri adalah
kesiapan keterbukaan Menteri Agraria untuk kiranya jika ada hal yang kira-kira diperlukan, apalgi soal-
soal yang menyangkut konflik pertanahan, dan juga soal-soal tanah, Kementerian mebuca diri dan
nanti kita akan duduk sama-sama dan tidak usah di keputusan seperti ini kita tulis itu ya? Soal Pak
Dadang itu nanti kita selesaikan, soal di Lampung akan juga kita selesaikan kan Menteri yang janji, jadi
tidak usah kita tambah keputusan ini, ini keputusan yang resmi.

Kesimpulan pertama adalah komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan tentang Renstra,
program kerja dan skala prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
dan meminta kepada Kementerian agar melaksanakan program secara konsisten khususnya 9 agenda
prioritas dan 7 langkah tugas dan fungsi utama demi kesejahteraan rakyat.
Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Yang kedua Komisi II DPR RI mendesak, jadi kalau tadi Saudara Menteri mengatakan Komisi
II yang menekan, yang memutuskan, nah ini kita desak dulu, Komisi II DPR RI mendesak Kementerian
Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan kasus tanah yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Karena kasus-kasus tanah sudah menjadi persoalan besar bangsa dan Negara.

Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat menentukan
system dan mekanisme khusus. Seperti yang kita katakan tadi, yang mengedepankan kepentingan dan
kesejahteraan rakyat. Mungkin nanti setelah ada petanya tadi saudara Menteri mengatakan Peta, yang
satu peta itu akan diperlihatkan tidak bias dibuka di sini, jadi memang mungkin aturan-aturannya akan
kita lanjutkan.

Jadi semuanya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Komisi II DPR RI mendukung penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan jalur
mediasi dan pada jalur peradilan, namun demikian harus ada kejelasan dan kepastian penyelesaian
masalah pertanahan yang ditempuh melalui jalur mediasi. Jadi jalur mediasinya ya harus tuntas. Dan
mencari alternatif peradilan yang dapat memberikan keputusan final dan mengikat, mungkin nanti di



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

n kita mulai harus cari sekarang agar persoalan ini tidak

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Keempat omisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria, jadi kalau tadi adalah pertama menerima, yang kedua mendesak, ketiga mendukung, keempat meminta, lain ini. Meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar memperhatikan secara sungguh-sungguh peningkatan sumber daya manusia dilingkungan Kementerian Agraria dan tata Ruang.

Ini Saudara Menteri dan dari BPN saya ini juga pernah mengurus sertifikat, tidak usah saya beritahu sampai sekarang belum selesai, uang saya juga sudah keluar, ke juru ukurnya kemana, karena memang tukang ukur satu orang, ini. Tapi dipengambilan kebijakan juga jangan diberikan peluan. Oleh karenanya khususnya pada aparat yang memberikan pelayanan dan kebijakan, jadi ada kebijakannya seperti juru ukur baik dari segi kualitas, maupun kuantitas juru ukurnya sehingga proses pengukuran tanah dalam rangka legalisasi aset semakin mudah dan cepat.

Ini saya kira tuntas juga, ada tambahan disitu?

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Saya kira kita harus konsisten saja jadi kalau sebelumnya tadi 1, 2, 3, disebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional disini tidak disebut.

KETUA RAPAT:

Oh BPN nya belum ya? Ya masukan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):

Kalau yang isinya saya tidak tahu ini antara pelayanan dan kebijakan itu, kalau kebijakan menurut saya itu wewenangnya Pak Menteri, karena di bawah itu kan sebagai pelaksana. Orang bawahan tidak boleh mengambil kebijakan menurut saya, pelayan saja. Kebijakan ada di tangan Pak Menteri, itu yang saya kritisi pak.

Menurut pemikiran saya kebijakan itu adal Top Leader itu, oke terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi yang dimaksud, begini kan ada di sini yang lebih mudah tadi, sudah mudah ada lagi tadi pelayanan yang memperhatikan ini, memperhatikan itu, paketnya satu, hasilnya satu. Jadi yang dibawah nanti bagaimana, jadi yang melayani kebijakan yang sudah, nah itu kira-kira yang dimaksudkan.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

NA HUTAURUK, SH., MM., MH):

gaimana pemberdayaan-pemberdayaan manusia, khususnya tadi mengenai, karena melekat ini, regionalisasi PPAT tadi, supaya ditambahkan karena beliau tadi sangat panjang menjelaskan masalah itu, karena sangat berkait, jadi mungkin di posisi empat ini ya seperti juru ukur, regionalisasi yang jelas terhadap PPAT yang melekat di dalam proses. Tapi beliau jelas sekali menjelaskan panjang lebar tentang regionalisasi masalah PPAT, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, kita tanya ya, yang saya maksudkan begini apa itu urusan dari Pak.

F-PAN (H. SUKIMAN, SPD., MM):

Menteri Hukum dan HAM itu

KETUA RAPAT:

Oh iya, jadi bukan di kesimpulan kita begitu pak. Silakan Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM):

Kalau kita melihat tadi apa yang sudah mau disimpulkan yang menurut saya tertinggal itu menyangkut masalah Tata Ruang, masalah Tata Ruang itu masih banyak provinsi yang punya tata ruang yang masih terkatung-katung semetara kita tahu ini juga masalah ekonomi dan masalah masyarakat yang ini, sehingga kita juga minta agar ini menjadi prioritas juga untuk diselesaikan terutama Kalimantan Tengah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Di poin empat bisa kita tambah disamping itu jadi yang kita maksudkan begitu, legalisasi aset semakin mudah dan cepat, dan juga penyelesaian masalah Tata Ruang di daerah-daerah, itu tambahannya. Tolong ditambah langsung.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Yang kelima ini keputusannya lima, sesuai dengan nomor lima, Komisi II DPR RI bertekad mendorong terbentuknya, sayang sudah ada yang lalu, Undang Undang Pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR RI Nomor 9 Tahun 2001 yang kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR RI nomor 1 Tahun 2003, untuk nantinya dibahas bersama pemerintah, untuk pemerintah dalam hal ini ya tadi saudara Menteri sudah mengajukan diri, maaf menawarkan 9 bulan selesai, kita menawar di sini dan diharapkan dapat selesai tahun 2015.

Setuju ya?

Baik.

(RAPAT : SETUJU)

an, kesimpulan telah kita ambil, kesimpulan yang tidak perlu
itu kita lanjutkan agar Saudara Menteri dan jajarannya yang
memegang kebijakan serta informasi yang menyangkut ini, no HP nya juga nanti kita minta, jadi Kaset
kami.

Ini perlu kita perkenalkan Pak Menteri, Kaset Komisi II, Kabag Set Komisi II sekarang Ibu Min,
sudah ada telfonnya jadi agar kita juga tidak nanti, agar kiranya hal-hal yang berurusan kemana dan
kemana untuk Komisi II memahaminya.

Demikianlah terima kasih untuk kita sekalian khususnya Saudara Menteri Agraria dan Tata
Ruang atas kehadirannya pada siang hari ini dan para anggota dengan mengucapkan
Alhamdulillahirobbil'alamin Rapat Kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan ini kami
tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.07 WIB)

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

**Jakarta, 22 Januari 2015
Ketua Rapat**

ttd

**Rambe Kamarul Zaman
A-236**